

**SIKAP POLITIK KIAI DAN SANTRI PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH
TERHADAP PENCALONAN THOBRONI HARUN DAN KOMARUNIZAR
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015**

(Skripsi)

**Oleh
Dita Adistia**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

POLITICAL ATTITUDE OF KIAI AND SANTRI OF AL-HIKMAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL AGAINST THE NOMINATION OF THOBRONI HARUN AND KOMARUNIZAR IN THE ELCTION OF MAYOR AND DEPUTY MAYOR OF BANDAR LAMPUNG 2015

By

DITA ADISTIA

Kiai of Al-Hikmah Islamic boarding school has the dual position namely as a nanny for the santri and as the owner of Islamic boarding school. Political attitudes of Kiai can affect the suffrage of santri in the election of Mayor and Deputy Mayor of Bandar Lampung 2015. The problem in this research was how the political attitudes of kiai and santri of Al-Hikmah Islamic boarding school against the nomination of Thobroni Harun and Komarunizar in the election of Mayor and Deputy Mayor of Bandar Lampung 2015.

The type of this research was descriptive research with qualitative approach. Data collecting techniques used were interviews and documentation. Data processing techniques used were and interpretation, while the data analysis technique used was simple qualitative analysis techniques.

The results showed that in cognitive aspects Kiai and Santri knew the election of Mayor and Deputy Mayor of Bandar Lampung in 2015, but most of santri did not know the figure, vision, mission, background, and candidate of Thobroni Harun and Komarunizar. In affective aspects kiai and santri admitted felt happy the election of Mayor and Deputy Mayor of Bandar Lampung, but they were mediocre to the figure, vision, mission and background of Thobroni Harun and Komarunizar. In evaluative aspect kiai and santri gave a good assessment to the election process of Mayor and Deputy Mayor of Bandar Lampung, but kiai and santri gave a negative assessment to the nomination of Thobroni Harun and Komarunizar.

Keywords: Political Attitude, Kiai and Santri, Election of Mayor and Deputy Mayor of Bandar Lampung

ABSTRAK

SIKAP POLITIK KIAI DAN SANTRI PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH TERHADAP PENCALONAN THOBRONI HARUN DAN KOMARUNIZAR DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015

Oleh

DITA ADISTIA

Kiai Pondok Pesantren Al-Hikmah memiliki kedudukan yang ganda yakni sebagai pengasuh bagi santri dan juga sebagai pemilik pondok pesantren. Sikap politik kiai dapat mempengaruhi hak pilih santri dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah sikap politik kiai dan santri pondok pesantren Al-Hikmah terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan interpretasi data, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif sederhana.

Hasil dalam penelitian ini adalah pada aspek kognitif kiai dan santri mengetahui adanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015, namun sebagian santri belum mengetahui figur, visi misi, latar belakang, dan kandidat Thobroni Harun dan Komarunizar. Pada aspek afektif kiai dan santri mengaku senang terhadap pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, namun mereka mengaku biasa saja terhadap figur, visi-misi dan latar belakang Thobroni Harun dan Komarunizar. Pada aspek evaluatif kiai dan santri memberikan penilaian yang baik terhadap proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, namun santri dan kiai memberikan penilaian negatif terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar.

Kata kunci : Sikap Politik, Kiai dan Santri, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung

**SIKAP POLITIK KIAI DAN SANTRI PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH
TERHADAP PENCALONAN THOBRONI HARUN DAN KOMARUNIZAR
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2015**

**Oleh
Dita Adistia**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 07 Juni 2016



Dita Adistia
1216021037

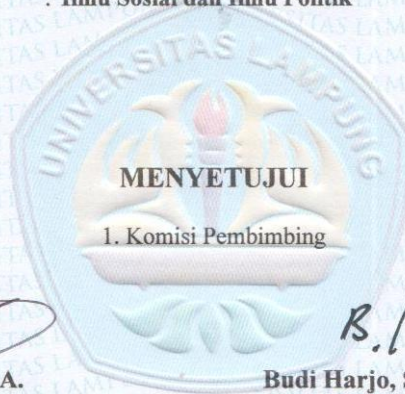
Judul Skripsi : **SIKAP POLITIK KIAI DAN SANTRI PONDOK
PESANTREN AL-HIKMAH TERHADAP PENCALONAN
THOBRONI HARUN DAN KOMARUNIZAR DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015**

Nama Mahasiswa : **Dita Adistia**

No. Pokok Mahasiswa : **1216021037**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Suwondo, M.A.
NIP 19590903 198503 1 002

Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP 19680112 199802 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

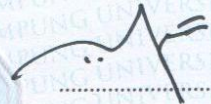
Ketua : Dr. Suwondo, M.A.



Sekretaris : Budi Harjo, S.Sos., M.IP.



Penguji : Dr. Pitojo Budiono, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Agus Hadiawan, M.Si.

NIP 19580109 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian : 09 Juni 2016

RIWAYAT HIDUP



Dita Adistia, dilahirkan di Bandar Lampung 09 September 1993, anak dari pasangan Bapak Akmal MD, SH dan Ibu Marsanah, S.pd. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Karya

Utama pada tahun 1998-2000 kemudian Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Perumnas Way Kandis pada tahun 2000-2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 8 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung dengan mengikuti jalur Mandiri (Ujian Mandiri).

Penulis sangat menyakini bahwa pengembangan diri sebagai manusia harus dicari dan dikembangkan sehingga menjadi sebuah pengalaman dalam hidup kita dimasa depan. Penulis, banyak mendapatkan hal-hal yang baru serta bermanfaat dalam menjalani proses sebagai seorang mahasiswa yang aktif di beberapa lembaga organisasi kampus/non kampus.

MOTO

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

(QS. At-Taubah ayat 105)

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dalam bentuk sebaik-baiknya”

(QS. At-Tin 95:4)

“Seseorang mulai hidup ketika ia bisa hidup di luar dirinya sendiri”

(Albert Einstein)

“ Hidup ini pilihan, maka pilih pilihan yang tepat”

(Dita Adistia)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan hasil karya yang sederhana

Untuk orang-orang yang luar biasa dalam hidupku:

“Bapak dan Ibu tercinta”

yang telah mempersembahkan

arti kehidupan melalui jerih payah, peluh keringat, rintihan, petuah dalam proses hidup yang cukup panjang..

serta selalu memberikan curahan kasih sayang, dukungan, dan doa'anya serta restu yang tiada hentinya hingga sekarang dan sampai nanti.

“Saudara Kandungku”

Nanda Pertiwi

Terima kasih atas semangat, curahan kasih sayang dan bantuan yang telah diberikan..

Seluruh **keluarga besarku** dan teman-teman terbaik yang selalu memberi warna dan pelajaran padaku, dari yang mengajarkan kepada dita arti hidup sampai membantu dalam proses penyusunan karya yang sederhana ini.

PARA GURUKU

Dari jenjang TK sampai Perkuliahaan, terimakasih atas bimbingan serta ilmu yang bermanfaat

“ALMAMATERKU UNIVERSITAS LAMPUNG TERCINTA”

“Yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman”

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Sikap Politik Kiai dan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Terhadap Pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015” yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis. Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Motivator terbesar dan teristimewa kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkan serta memberikan curahan kasih sayang yang tak pernah kurang dengan sepenuh hati. Untuk ayah yang sangat luar biasa terimakasih untuk pengalaman, ajaran serta didikannya selama ini untuk kepercayaan yang telah diberikan. Untuk ibu, sosok seorang wanita yang sangat luar biasa

terimakasih untuk semua nasihat dan kepercayaan yang telah diberikan dan doa yang tak pernah putus untuk mendoakan anaknya. Insha Allah saya akan membahagiakan kedua orangtuaku, aamiin.

2. Untuk Saudara Kandungku Nanda Pertiwi terimakasih untuk semua dukungannya, segera menyelesaikan kuliahnya, raih cita-cita yang ingin dicapai dan tetap menjadi adik yang baik.
3. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Drs, Aman Toto Dwijono, MH. selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas keluangannya untuk berkonsultasi serta memberikan kritik dan sarannya.
7. Bapak Dr. Suwondo, MA. selaku dosen pembimbing utama, terimakasih atas keluangannya untuk berkonsultasi serta memberikan kritik, saran, masukan serta motivasi dalam proses bimbingan skripsi ini.
8. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP. selaku dosen pembimbing pembantu, terimakasih atas keluangannya untuk berkonsultasi serta memberikan kritik, saran, masukan serta motivasi dalam proses bimbingan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si. selaku dosen pembahas skripsi terimakasih atas kesediannya memberikan bimbingan ,saran, kritik serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Terimakasih untuk seluruh Jajaran Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung terimakasih atas wawasan ilmu dan warna-warni kehidupan, mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan dan Terimakasih untuk seluruh Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, terimakasih telah banyak membantu penulis.
11. Terimakasih untuk seluruh responden di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kota Bandar Lampung yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis.
12. Terimakasih untuk LPG 04 Arum Rahma Sari, Nisa Septiara, Nisa Nurul Fathia kita sudah bersahabat dari awal kita kuliah sampai dengan kita akan memakai toga. Kalian sudah seperti saudara, tetap menjadi sahabat yang aneh, harus diingat ya bercanda gak sejahat itu loh, gak sesakit itu, paham kan maksudnya haha. Semangat untuk kita semua, sukses untuk kedepannya karena kita harus masih terus berjuang dan tetap semangat.
13. Terimakasih untuk teman-teman SMA yaitu gengs ppoy, Poi, Amel, Suci Dok, Suci Nur, teruntuk poii dan suci dok semangat sih jangan galau mulu hahaha, sukses dengan pekerjaannya yang baru ya. Untuk amel dan suci nur ayok semangat selesain skripsinya, jangan pacaran mulu ya haha. Semangat untuk kalian semua, sukses untuk kedepannya.
14. Terimakasih untuk Nevia Setiana, Intan Kumala Sari, Nugraha Wijaya, Juanda, Vico Bagja Lukito, Rosim Nyerupa, Rizky Hendarji Putra, Nico Purwanto, M Ichsan, Winda Dwi Astuti dan Primadya Rosa Ayu terimakasih untuk kebersamaannya selama ini, baik di dalam berproses di bidang

akademik, berorganisasi di dalam kampus maupun hal yang tak terduga yang sering kita lakukan (nongkrong dipkm) hahaha.

15. Terimakasih untuk Agustin, Suci, Adel, Aulia, Angela, Astari, Ubi, Bakti, Dedek, Dwi, Evan, Bagas, Ulina, Umpu, Erin, Lutfi, Guntur, Meta, Nita, Nina, Yoga, Anggun, Ayu Rara, Maya, Eri, Ira, Ayu, Rizki Pranata, Mutiara, Widi,Rendi, Juni, Saiful, Surya, Yoga Pratama, Novella, Yogi, Dalillah, Anggun, Icak, Syaqib, Dila, Dian, Ika , Galih, Baihaki, Defi, Hanafi, Nando, Marliyani, Rizky Arie, April, Syaqib, Rizky, Lintang, Nanda,Angela, Khairul, Budi, Rendi dan semua keluarga besar Ilmu Pemerintahan Angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Terimakasih untuk teman-teman KKN Lala, Ade, Kak Dimas, Kak Andre. Selama 40 hari kita tinggal bersama, semoga silaturahmi kita tidak putus ya. Terimakasih juga untuk Desa Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.
17. Terimakasih untuk Abang Okta, Abang Iin, Abang Roby, Abang Putra, Abang Dimas, Abang Eki, Abang Novrico, Abang Andri, Abang Riki, Abang Putra, Abang Kepin, Abang Hazi, Abang Anbeja, Abang Wilanda, Mba Eta, Mba resti, Mba Siska, Mba Yoan serta Kanda dan Yunda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas bimbingannya serta kerja samanya selama saya ikut berorganisasi di kampus.
18. Terimakasih untuk teman-teman lintas Jurusan Nanda, Nick (Jali), Ayu, Yajid, Eno, Ocak Dian, dan Indra sukses untuk kalian semua.
19. Terimakasih untuk adinda angkatan 2013 dan 2014 Tiyas, Taufik, Anam, Putra, Adit, Muklisi, Ridwan, Danang, Chili Pink (Depoy, Nyunyun, Fira,

Bella, Mike) Sheila, Rizki, Maya serta yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

20. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar HMJ Ilmu Pemerintahan dan Terimakasih untuk seluruh keluarga besar LSSP Cendekia.

Bandar Lampung, 07 Juni 2016

Dita Adistia

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT

ABSTRAK

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan penelitian	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Budaya Politik.....	12
1. Pengertian Budaya Politik.....	12
2. Tipe-Tipe Budaya Politik.....	17
B. Tinjauan Tentang Sikap	26
1. Pengertian Sikap	26
2. Ciri-Ciri Sikap	27
3. Fungsi Sikap	28
4. Komponen-Komponen Sikap	29
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembentukan dan Perubahan Sikap	31
C. Tinjauan Tentang Sikap Politik	32
1. Sikap Politik	32
2. Komponen Sikap Politik	33
3. Pengertian Kiai.....	34
4. Pengertian Santri	35
5. Hubungan Nahdlatul Ulama (NU), dan Pondok Pesantren.....	36
D. Tinjauan Tentang Pondok Pesantren	37
1. Definisi Pondok Pesantren	37
2. Pola pendidikan	38
3. Tipe pondok Pesantren	39

4. Nilai-nilai Pondok Pesantren	41
5. Fungsi Pondok Pesantren	42
E. Tinjauan Tentang Pemilukada	43
F. Kerangka Fikir	45
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	49
B. Fokus Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian	53
D. Jenis Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Pengelolaan Data	57
G. Informan	58
H. Teknik Analisis Data	61
I. Teknik Penarikan Kesimpulan	64
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Hikmah Kota Bandar Lampung	65
1. Kegiatan didalam Pondok Pesantren Al-Hikmah	65
2. Struktur Pondok Pesantren Al-Hikmah	69
B. Gambaran Umum tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015	71
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	74
1. Deskripsi Data	75
A. Aspek Kognitif Kiai Dan Santri Terhadap Pencalonan Thabroni Harun dan Komarunizar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015.....	76
B. Aspek Afektif Kiai dan Santri Terhadap Pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015.....	85
C. Aspek Evaluatif Kiai dan Santri Terhadap Pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015.....	94
B. Pembahasan	104
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	122
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nama Pondok Pesantren yang Cukup Terkenal di Kota Bandar Lampung	3
2. Jumlah Santri yang menetap di Pondok Pesantren Al-Hikmah	6
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
4. Deskripsi data Kiai dan Santri Pondok pesantren Al-Hikmah.....	58
5. Nama Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2015.....	72
6. Rekapitulasi hasil Pemilihan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2015.....	72
7. Aspek Kognitif.....	84
8. Aspek Afektif.....	93
9. Aspek Evaluatif.....	103
10. Hasil Analisis Fungsi Sikap Politik Kiai dan santri Pondok Pesantren Al-Hikmah terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015	118
11. Sikap politik kiai dan santri pondok pesantren Al-Hikmah terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	48

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Istilah “tradisional” tersebut dapat diartikan bahwa pesantren telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, bukan “tradisional” dalam arti tetap tanpa mengalami penyesuaian. Secara sosial, pesantren telah memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pondok pesantren sudah menyediakan pendidikan formal dan non formal, hal ini dapat dilihat bahwa pondok pesantren tidak hanya memberikan pelajaran tentang ilmu agama saja melainkan sudah memberikan pelajaran umum.

Perkembangan pondok pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan tertua di Indonesia mulai menjamur khususnya di tanah Jawa sejak abad ke-17. Keberadaan pondok pesantren dalam sejarah Indonesia telah melahirkan hipotesis yang barangkali memang telah teruji, bahwa pondok pesantren dalam perubahan sosial bagaimanapun senantiasa berfungsi sebagai penyebaran dan sosialisasi Islam. Sampai saat ini keberadaan pondok pesantren tetap kokoh dan konsisten mengikatkan dirinya sebagai lembaga

pendidikan yang mengajarkan dan mengembangkan nilai-nilai Islam. Realitas ini tidak saja dapat dilihat ketika pondok pesantren menghadapi banyak tekanan dari pemerintah pasca kolonial belanda sampai dengan sekarang.

Aktivitas kiai dalam pondok pesantren selain menjalankan ibadah, juga menjalankan aktivitas mengajar dan memberikan ilmu kepada santri tentang ajaran agama Islam. Selain itu kiai juga berkewajiban mengontrol dan mengawasi seluruh kegiatan santri sehari-hari di dalam pondok pesantren agar tetap dapat mengikuti semua aturan-aturan yang ada di dalam pondok pesantren. Proses pembelajaran yang dilakukan di pondok pesantren yang melibatkan kiai dan santri membentuk hubungan emosional yang kuat dan telah membentuk pola pikir dan pola perilaku yang khas di pondok pesantren. Kedudukan seorang kiai di dalam sebuah pondok pesantren adalah sebagai pemimpin yang berkuasa penuh dalam mendidik para santrinya.

Kiai memiliki kedudukan yang ganda yakni sebagai pengasuh bagi santri dan juga sebagai pemilik pondok pesantren tersebut. Jumlah santri yang banyak didalam pondok pesantren menjadikan pondok pesantren lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang dipimpin oleh seorang kiai. Semakin banyak santri yang berada di pondok pesantren semakin besar pondok pesantren tersebut. Dengan posisi yang sangat strategis ini dijadikannya pondok pesantren sebagai tempat untuk menggalang suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Posisi kiai sebagai pemimpin pondok pesantren yang memiliki banyak santri tentu saja dianggap oleh pihak tertentu

sebagai tempat yang paling baik untuk meminta dukungan agar salah satu calon dapat menang.

Kota Bandar Lampung terdapat banyak pondok pesantren keberadaan pondok pesantren di kota Bandar Lampung ternyata masih tetap hidup sampai dengan sekarang di tengah arus zaman yang semakin modern. Peran serta pondok pesantren di perkotaan ini tidak bisa dianggap kecil, meski tidak tersebar merata di hampir semua kecamatan atau kelurahan di Bandar Lampung. Keberadaan pondok pesantren di Bandar Lampung ternyata masih diminati warga kota, baik mereka yang memang menetap di pondok pesantren maupun yang hanya saat jam belajar saja alias santri kalong. Terdapat beberapa pondok pesantren yang terus hidup sampai dengan sekarang di Bandar Lampung, berikut data pondok pesantren yang terdapat di Bandar Lampung.

Tabel 1. Nama Pondok Pesantren yang Cukup Terkenal di Kota Bandar Lampung

No. (1)	Nama Pondok Pesantren (2)	Alamat (3)
1.	Pondok Pesantren Safiinatuddarain	Jl. Teluk Bone Sukabanjar Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung
2.	Pondok Pesantren Utrujiyyah	Jl. Teluk Ratai Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung
3.	Pondok Pesantren Perkemas	Jl. Ikan Kerapu No. 130721-7476325 Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung
4.	Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin	Kroi RT.012 LK I Panjang Kota Bandar Lampung
5.	Pondok Pesantren asanuddin	Jl. Mayor Salim Batubara 0721-485100 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung
6.	Pondok Pesantren Al Khairiyah	Jl. KH. Agus Salim 0828-7021942 Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung

No. (1)	Nama Pondok Pesantren (2)	Alamat (3)
7.	Pondok Pesantren Daarus Sa'adah	Jl. H. Agus Salim Gg. Sukasari 0721-259794 Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
8.	Pondok Pesantren Mardiah	0721253873 Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
9.	Pondok Pesantren Masyariqul Anwar	Jl. Chairil Anwar No. 5/09 0721-7623090 Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
10.	Pondok Pesantren Nurul Jabal	Jl. Sisingamangaraja No. 4 0813-79294177 Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
11.	Pondok Pesantren Al Hikmah	Jl. ST. Agung Gg. Rd. Saleh 230721-700992 Kedaton Kota Bandar Lampung
12.	Pondok Pesantren Miftahul Khair	Jl. Pulau Pandan No. 28 0721-706642 Sukarame Kota Bandar Lampung
13.	Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah	Jl. Teuku Cit Ditiro 0721-7478755 Kemiling Kota Bandar Lampung
14.	Pondok Pesantren Yamama	Girijaya Sumber Agung 0721-7495602/ 0 Kemiling Kota Bandar Lampung
15.	Pondok Pesantren Miftahus Shudur	Jl. Nunyai Gg. Raya No. 85 0721-789709 Rajabasa Kota Bandar Lampung

Sumber : (<http://raudlatululumkencong.blogspot.co.id/2014/02/alamat-lengkap-pondok-pesantren-di.html>, diakses tanggal 1 Desember 2015, 11:29 WIB).

Dari data yang telah di atas bahwa ada sekitar 15 pondok pesantren yang cukup besar yang ada di Kota Bandar Lampung. Salah satunya ialah Pondok Pesantren Al-Hikmah yang sampai saat ini termasuk pondok pesantren yang masih diminati oleh masyarakat dan memiliki santri yang cukup banyak. Pondok pesantren Al-Hikmah dipimpin oleh K.H. Ahmad Sobari juga pendiri dari Pondok Pesantren Al-Hikmah. Kiai Sobari juga termasuk Kiai sepuh yang berada di pondok pesantren Al-Hikmah. Kiai Sobari tidak hanya dikenal

di pondok pesantren Al-Hikmah saja melainkan di beberapa Pondok Pesantren yang ada di Kota Bandar Lampung. Adapun hal yang membuat kiai Sobari dikenal ialah karena kiai Sobari pernah menjabat sebagai ketua MUI Kota Bandar Lampung.

Keberadaan Kiai Sobari di pondok pesantren Al-Hikmah cukup besar pengaruhnya bagi santri karena beliau juga sebagai pengajar ajaran agama Islam. Sudah banyak yang telah menjadi alumni lulusan dari pondok pesantren Al-Hikmah. Para alumni tersebut ada yang menjadi pengasuh dan pengajar di pondok pesantren Al-Hikmah, tetapi ada juga alumni yang memilih untuk melanjutkan kuliahnya. Bahwasannya tidak ada paksaan jika para alumni tidak mengabdikan di pondok pesantren, semua kembali kepada santri tersebut. Pengaruh kiai Sobari memang sangat besar di pondok pesantren Al-Hikmah dibuktikan dengan banyak alumni dari pesantren Al-Hikmah yang sudah ada yang menjadi penceramah dan pendakwah.

Para santri memang sudah dididik untuk bisa menjadi penceramah dan berdakwah di masyarakat ketika mereka sudah menjadi alumni atau masih menjadi santri. Informasi yang saya dapatkan dari salah satu staf pegawai di pondok pesantren tersebut jumlah santri yang ada di pondok pesantren Al-Hikmah ada sekitar 488 santri yang menetap di pondok pesantren tersebut, ada juga santri yang tidak menetap di pondok pesantren. Santri yang tidak menetap di pondok pesantren disebut sebagai santri kalong yang jumlahnya sekitar 1000 santri, jadi jumlah santri yang ada di pondok pesantren Al-

Hikmah sekitar 1500 santri. Berikut data santri yang menetap di pondok pesantren Al-Hikmah :

Tabel 2. Jumlah Santri yang menetap di Pondok Pesantren Al-Hikmah

No	Kelompok Santri	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Madrasah Tsanawiyah (SMP)	113	127	240
2.	Madrasah Aliyah (SMA)	100	131	231
3.	Mahasiswa	5	12	17
	Jumlah	218	270	488

Sumber: Pondok Pesantren Al-Hikmah

Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2015 santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah ikut serta dalam memberikan hak suaranya di Tempat Pemilihan suara (TPS), jumlah santri yang sudah dapat memilih adalah kelompok santri Aliyah (SMA) yang sudah mencapai umur 17 tahun keatas. Para santri yang sudah memiliki hak suara untuk memilih, ada sekitar 57 santri. Kaum santri dapat memilih calon walikota dan wakil walikota yang akan menjadi walikota dari kalangan kiai atau memang dari kalangan politik.

Salah satu pasangan calon Wakil Walikota yaitu Komarunizar merupakan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Bandar Lampung dan beliau juga adalah seorang Kiai. Selain menjadi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Komarunizar adalah seorang pengajar dilembaga pendidikan kanak-kanak dan prasekolah di Mitra Persada yang mempunyai program menciptakan guru taman kanak-kanak. Komarunizar memiliki alasan mengapa Komarunizar mau menjadi wakil walikota yang berpasangan

dengan Thobroni Harun karena Komarunizar merasa memiliki kecocokan visi dan misi untuk memajukan Kota Bandar Lampung.

Thobroni adalah Ketua DPD PAN Bandar Lampung, Thobroni juga aktif sebagai ketua dalam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Bandar Lampung. Komarunizar sudah hampir 15 tahun menjadi tokoh agama dan juga menjadi penceramah di beberapa Pondok Pesantren di Bandar Lampung.

Komarunizar sering berceramah di pondok pesantren sekitar Batu Putu beliau juga memang sudah cukup mengenal para Kiai yang ada di pondok pesantren tersebut. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Thobroni Harun memilih Komrunizar sebagai calon Wakil Walikotanya untuk maju pada pemilihan walikota dan wakil walikota . Pasangan Thobroni Harun dan Komarunizar mendapat nomor urut 3 pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.

Dunia politik bagi Komarunizar merupakan hal yang baru karena komarunizar aktif di dunia politik baru satu tahun dan dengan pencalonan dirinya sebagai Wakil Walikota Bandar Lampung dengan Tobroni Harun harapannya Komarunizar dapat memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Keikutsertaan Komarunizar di dalam dunia politik khususnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota membuat dirinya memasuki dunia politik yang memang bagi dirinya menjadi dunia yang baru, sebab Komarunizar adalah seorang kiai dan tokoh Agama.

Secara umum Thobroni Harun memilih Komarunizar sebagai Wakil Walikota karena Komarunizar adalah tokoh Agama, berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU), dan memiliki banyak pengikut. Selain itu bahwa di Bandar Lampung memiliki banyak Pondok Pesantren memberikan peluang untuk meraih dukungan dari jamaahnya yang ada di pondok pesantren. Sebagaimana yang kita pahami bahwa Pondok pesantren identik dengan Nahdlatul Ulama (NU). Komarunizar salah satu calon Wakil Walikota Bandar Lampung yang menjadi tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Jika sikap politik kiai dalam dunia politik dapat mempengaruhi hak pilih santri maka dapat dikatakan bahwa santri akan memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota dari kalangan kiai juga. Bisa saja terjadi pengaruh atau koalisi yang dilakukan pasangan calon terhadap kiai yang ada di Bandar Lampung, karena mereka tahu bahwa kiai mempunyai pengaruh yang kuat terhadap santri.

Berdasarkan kajian sikap politik kiai dan santri dalam menyikapi pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar terhadap pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung dengan menilik pada komponen-komponen sikap seperti Almond dan verbal dalam Sudjino Sastroatmodjo (1998:37-38) menjelaskan komponen sikap adalah (1) Komponen Kognitif (Pengetahuan), (2) Komponen Afektif (perasaan), dan (3) Komponen Evaluatif (Penilaian) komponen dari sikap tersebut, kiai dan santri memiliki kecenderungan untuk mengetahui adanya pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar terhadap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung (Kognitif), kecenderungan untuk merasakan atau timbal balik perasaan setelah

mengetahui adanya pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar terhadap pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung, dan kecenderungan untuk menilai pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar terhadap pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung. Dari ketiga komponen sikap diatas peneliti mengkaji sikap politik Kiai dan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah.

Sikap politik kiai dan santri terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar terhadap pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung akan menghasilkan antara lain, pertanyaan yang menunjukkan atau memperlihatkan menerima dan menyetujui pencalonan Thobroni Harun (sikap positif) dan pertanyaan yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak setuju (sikap negatif) atau bersikap menerima dan menyetujui pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar (netral).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Sikap Politik Kiai dan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Terhadap Pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.

Terkait dengan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Uly Qonita. (2008). Sikap Politik Kiai dan Impikasinya Terhadap Pilihan Politik Santri Kaliwung Dalam Pilkada Kendal Tahun 2005. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implikasi sikap politik kiai terhadap pilihan politik

santri di Kaliwungu dalam pilkada Kendal tahun 2005 masih sangat kuat. Dari tiga pondok pesantren yang diteliti pasangan bakal calon yang didukung oleh pihak pengasuh pondok pesantren pasti memenangkan suara di TPS tempat pesantren tersebut berada, meskipun kemenangan itu tidak selalu seratus persen. Kuatnya kultur hubungan yang paternalistik antara kiai dan santri yang direproduksi lewat sistem sosial dan pendidikan pesantren bisa ditunjuk sebagai sebab yang memunculkan kepatuhan dan kesetiaan santri terhadap pilihan politik kiai.

(Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syar'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang).

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah dimana penelitian sebelumnya melihat sikap politik kiai dan santri dalam implikasinya sedangkan penelitian ini peneliti hanya melihat sikap politik kiai dan santri terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar terhadap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah Bagaimanakah sikap politik kiai dan santri pondok pesantren al-hikmah terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap politik kiai dan santri pondok pesantren Al-Hikmah terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang politik Islam dalam mengkaji sikap politik kiai dan santri terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Waliota Bandar Lampung Tahun 2015.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangsih pemikiran atau informasi bagi kiai dan santri terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Budaya Politik

1. Pengertian Budaya Politik

Konsep budaya politik muncul dan mewarnai wacana ilmu politik pada akhir Perang Dunia II, sebagai dampak perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat. Setelah PD II selesai, di Amerika Serikat terjadi apa yang disebut revolusi dalam ilmu politik, yang dikenal sebagai *Behavioral Revolution*, atau ada juga yang menamakannya dengan *Behavioralism*. *Behavioral revolution* yang terjadi dalam ilmu politik adalah sebagai dampak dari semakin menguatnya tradisi atau madzhab *positivisme*, sebuah paham yang percaya bahwa ilmu sosial mampu memberikan penjelasan akan gejala sosial termasuk ilmu politik, seperti halnya ilmu-ilmu alam mampu memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam.

Paham ini sangat kuat diyakini oleh tokoh-tokoh besar sosiologi, seperti Herbert Spencer, Auguste Comte, juga Emile Durkheim (Afan Gaffar, 2006: 97). Paham positivisme merupakan pendapat yang sangat kuat di Amerika Serikat semenjak Charles E. Merriam mempelopornya di 20 Universitas Chicago, yang kemudian dikenal sebagai *The Chicago*

School atau Madzhab Chicago, yang memulai pendekatan baru dalam ilmu politik (Somit and Tannenhaus, 1967; Almond and Verba, 1963; Almond, 1990 dalam Afan Gaffar, 2006: 97).

Salah satu dampak yang sangat mencolok dari *behavioral revolution* ini adalah munculnya sejumlah teori, baik yang bersifat *grand* maupun pada tingkat menengah (*middle level theory*). Kemudian, ilmu politik diperkaya dengan sejumlah istilah, seperti misalnya *sistem analysis*, *interest aggregation*, *interest articulation*, *political socialization*, *politic culture*, *conversion*, *rule making*, *rule dan application* (Afan Gaffar, 2006: 98).

Budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya (Rusadi Kantaprawira, 2006: 25). Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Teori tentang sistem politik yang diajukan oleh David Easton, yang kemudian dikembangkan pula oleh Gabriel Almond, hal ini mewarnai kajian ilmu politik pada kala itu (1950-1970). Dan diantara kalangan teoritis dalam ilmu politik yang sangat berperan dalam mengembangkan teori kebudayaan politik adalah Gabriel Almond dan Sidney Verba,

ketika keduanya melakukan kajian di lima negara yang kemudian melahirkan buku yang sangat berpengaruh pada 1960-an dan 1970-an, yaitu *The Civic Culture*. *Civic Culture* inilah yang menurut Almond dan Verba merupakan basis bagi budaya politik yang membentuk demokrasi menunjukkan bahwa “tiap sistem politik mewujudkan dirinya didalam pola orientasi-orientasi dan tindakantindakan politik tertentu” (Afan Gaffar, 2006: 99).

Dalam pengertian yang hampir sama, Lucian W. Pye (1965:24) mendefinisikan budaya politik sebagai “the ordered subjective realism of politic, yaitu tertib dunia subjektif politik”. Definisi budaya politik menurut Verba (1965:31) merupakan yang paling jelas. Bahwa “budaya politik”, demikian katanya, “menunjuk pada sistem kepercayaan-kepercayaan tentang pola-pola interaksi politik dan institusi-institusi politik (A. Rahman H.I, 2007: 268).

Almond dan Verba menunjuk bukan pada apa yang diyakini orang tentang kejadian-kejadian tersebut dan kepercayaankepercayaan yang dimaksud dapat mengenai beraneka jenis, berupa kepercayaan-kepercayaan empirik mengenai situasi kehidupan politik, dapat berupa keyakinan-keyakinan mengenai tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang harus dihayati di dalam kehidupan politik dan semuanya itu dapat memiliki perwujudan atau dimensi emosional yang sangat penting.

Budaya politik sebagai: *“Suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem tersebut”* Almond dan Verba (1984: 14).

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu, dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya (Miriam Budiardjo, 2008: 58-59).

Kegiatan politik warga negara, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik. Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan dan kepemimpinan.

Budaya politik suatu bangsa dapat didefinisikan sebagai pola distribusi orientasi-orientasi yang dimiliki oleh anggota masyarakat terhadap objek-objek politik atau bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus

menuju tujuan politik diantara masyarakat itu. Lebih jauh dinyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Pengertian budaya politik diatas, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Konsep orientasi mengikuti pengertian Talcott Parsons dan Verba yang mendefinisikan orientasi sebagai aspek-aspek dari objek dan hubungan-hubungan yang diinternalisasikan di dalam dunia subjektif individu (Rusadi Kantaprawira (2006: 25).

Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya, kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat tertentu, yang semakin mempertegas bahwa masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual (Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin, 1991: 21).

Budaya Politik menjadi penting untuk dipelajari dan dipahami karena ada dua sistem. *Pertama*, sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Sikap dan orientasi politik sangat mempengaruhi bermacam-macam tuntutan, hal yang diminta, cara tuntutan itu di utarakan, respon dan dukungan terhadap golonganm elit politik, respons dan dukungan terhadap rezim yang berkuasa. *Kedua*, dengan mengerti sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang lebih membawa perubahan sehingga sistem politik lebih demokratis dan stabil Budaya politik selalu inhern pada setiap masyarakat yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup dalam sistem politik tradisional, transnasional, maupun modern (A. Rahman H.I, 2007: 269).

2. Tipe-Tipe Budaya Politik

Berdasarkan orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan politiknya atau budaya politiknya, Almond dan Verba membaginya dalam tiga tipe budaya politik, yakni budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek dan budaya politik partisipan. Yang penting dari klasifikasi tersebut adalah kepada objek politik apa, aktor politik individual yang berorientasi, bagaimana mereka mengorientasikan diri, dan apakah objek-objek politik tersebut terlibat secara mendalam dalam pembuatan kebijaksanaan yang bersifat ke atas atau dalam arus pelaksanaan kebijaksanaan yang bersifat ke bawah. Hasilnya adalah klasifikasi tiga tipe ideal budaya politik, yaitu sebagai berikut:

a. Budaya politik parokial (*parochial political culture*)

Adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan-harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik. Budaya politik parokial yang kurang lebih bersifat murni merupakan fenomena umum yang biasa ditemukan didalam masyarakat-masyarakat yang belum berkembang, dimana spesialisasi politik sangat minimal.

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil dan sederhana, sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki pengkhususan tugas. Tetapi peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan peranannya baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan/spiritual. Selain itu, dalam budaya politik parokial juga menyatakan adanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. Masyarakat dengan budaya politik parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik (Almond dan Verba, 1984: 20).

Budaya Politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, yang didalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa

mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasi dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik yang terdapat di negaranya, mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.

Budaya ini hidup dalam masyarakat dimana orang-orangnya sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Selain itu, mereka juga tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.

b. Budaya politik subjek/kaula (*subject political culture*)

Masyarakat yang berbudaya politik subjek/kaula, mereka memang memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (*input*) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (*output*) masih sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggaan terhadapnya atau sebaliknya tidak menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang absah. Namun demikian, posisinya sebagai subjek (kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif. Diyakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apaapa terhadap perubahan politik (Almond dan Verba, 1984: 21).

Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan rakyat memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan/kebijakan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubah, dikoreksi apalagi ditentang.

Budaya politik ini ditemukan dalam masyarakat yang orang-orangnya secara pasif patuh terhadap pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik atau memberikan suara dalam pemilihan. Dalam budaya ini tidak dikembangkannya kapabilitas responsif, sehingga masyarakat enggan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Budaya politik subjek muncul jika orientasi afektif saja yang kuat (Budi Winarno, 2008: 18).

Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek/kaula, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik yang rendah dan keberdayaan politik yang rendah. Sehingga, sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi.

c. Budaya politik partisipan (*participant political culture*)

Adalah suatu budaya politik dimana warga masyarakatnya sudah memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik, dan administratif. Dengan perkataan lain, perhatian dan intensitas

terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi. Budaya politik partisipasi dirinya atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya.

Masyarakat juga merealisasikan dan mempergunakan hak-hak politiknya. Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partisipan tidak begitu saja menerima keputusan politik. Hal ini karena masyarakat telah sadar bahwa betapapun kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu.

Budaya politik partisipan hidup dalam masyarakat yang orang-orangnya melibatkan diri dalam kegiatan politik atau paling tidak dalam kegiatan pemberian suara, dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik. Budaya politik partisipan muncul jika orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif dikembangkan secara maksimal dan seimbang, dengan budaya politik partisipan, maka kerja sistem politik demokrasi dapat dikembangkan karena pada budaya politik ini warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya sikap saling percaya (*trust*) antar warga negara. Oleh karena itu, dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik (Budi Winarno, 2008: 18).

Kombinasi antara tiga tipe budaya politik diatas dapat membentuk tipe-tipe budaya politik campuran. Secara konseptual terdapat tiga tipe budaya politik campuran, yaitu:

1) Budaya subjek-parokial:

Adalah tipe budaya politik yang sebagian besar penduduknya menolak tuntutan-tuntutan eksklusif (khusus) pada masyarakat kesukuan atau desa atau otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus. Bentuk budaya campuran ini merupakan peralihan atau perubahan dari pola budaya parokial (parokialisme lokal) menuju pola budaya subjek (pemerintahan yang sentralistis).

2) Budaya subjek-partisipan:

Merupakan peralihan atau perubahan dari budaya subjek (pemerintahan yang sentralistis) menuju budaya partisipan (demokratis). Cara-cara yang berlangsung dalam proses peralihan dari budaya parokial menuju budaya subjek turut berpengaruh pada proses ini. Dalam proses peralihan ini, pusat kekuasaan parokial dan lokal turut mendukung pembangunan infrastruktur demokratis.

3) Budaya parokial-partisipan:

Banyak terdapat pada negara-negara berkembang yang melaksanakan pembangunan politik. Di sejumlah negara ini pada umumnya budaya politik yang dominan adalah budaya

parokial. Sedangkan norma-norma struktural yang diperkenalkan biasanya bersifat partisipan.

Klasifikasi budaya politik ke dalam tiga tipe ideal sebagaimana diungkapkan oleh Almond dan Verba, sama sekali tidak mengasumsikan bahwa tipe yang satu meniadakan tipe yang lain. Klasifikasi itu tidak harus disimpulkan bahwa orientasi yang satu akan menggantikan orientasi yang lain (Almond dan Verba, 1984: 22).

Model-model budaya politik di atas kaitannya dengan studi tentang budaya politik dirasakan penting karena dapat menunjukkan karakteristik-karakteristik khas serta orientasi-orientasi warga negara terhadap sistem dan proses politik. Karena budaya politik masyarakat merupakan aspek yang sangat signifikan dalam sistem politik suatu bangsa. Perhatian terhadap budaya politik setidaknya dilandasi oleh dua hal. *Pertama*, sistem politik yang di dalamnya terdapat partai politik mempunyai keterkaitan yang kompleks antara budaya politik dengan aspek-aspek lain dalam sistem politik, baik formal maupun informal. *Kedua*, dilandasi oleh keyakinan bahwa budaya politik masyarakat merupakan aspek yang sangat signifikan dalam sistem politik.

Terdapat hubungan yang dekat antara struktur dan budaya politik. Selain itu, budaya politik merupakan cerminan dari nilai, sikap, perilaku, dan orientasi individual terhadap politik atau sistem politik. Menurut David Easton, budaya politik merujuk pada tindakan atau

tingkah laku yang membentuk tujuan-tujuan umum maupun khusus mereka dan prosedur-prosedur yang mereka anggap harus diterapkan untuk meraih tujuan-tujuan tersebut (Budi Winarno, 2008: 15).

Budaya politik menunjuk pada orientasi dari tingkah laku individu atau masyarakat terhadap sistem politik. Orientasi politik tersebut terdiri dari 2 tingkat yaitu: di tingkat masyarakat dan di tingkat individu. Orientasi masyarakat secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari orientasi individu. Masyarakat mengidentifikasi dirinya terhadap simbol-simbol dari lembaga-lembaga kenegaraan. Orientasi dari tingkah laku individu tersebut terwujud dalam bentuk keterlibatan di bidang politik dalam kehidupan bernegara. Misalnya, ikut memberikan suara atau menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil rakyat dalam Pilkada (Almond dan Verba, 1984: 17).

Suatu sistem politik, budaya politik sangat dipengaruhi oleh agen (aktor) yang menjalankan sistem politik tersebut. Karena pada kenyataan empirik aktorlah yang sangat menentukan jalan atau tidaknya sistem politik. Sehingga, dalam menjalankan tugasnya apa yang dilakukan oleh aktor-aktor politik harus disesuaikan dengan budaya politik pada sistem politik yang dianut. Budaya politik suatu bangsa akan mempengaruhi tingkah laku warga dan pemimpinnya dalam sistem politik. Lebih jauh, budaya politik mempengaruhi perilaku memilih masyarakat, dalam hal ini perilaku individu-individu dalam peran politik mereka untuk memilih atau tidak memilih wakil

rakyat dalam PemiluKada, perilaku masyarakat terhadap isi tuntutan politik, dan respon mereka terhadap hukum pada saat yang sama, kesempatan dan tekanan-tekanan yang ditentukan oleh struktur politik yang ada pada masyarakat akan menentukan budaya politiknya. Ketika diadakan PemiluKada maka budaya politik yang ada pada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap perilaku memilihnya.

Dalam hal ini, masyarakat akan bersikap rasional, bersikap pragmatis, bersikap apatis (acuh tak acuh) atautkah mereka memang sudah mempunyai kesadaran politik untuk memilih wakil rakyat yang ada didaerahnya dalam PemiluKada. Kemudian, ketika berbicara budaya politik dalam suatu negara, tentu terdapat faktor-faktor yang turut mempengaruhi budaya politik yang berkembang pada suatu negara di antaranya:

- 1) Karakter nasional, misalnya saja orang-orang Indonesia berbeda dengan orang-orang Malaysia, Thailand, ataupun Filipina, meskipun barangkali mereka adalah serumpun. Karena orang-orang Indonesia memiliki karakter atau ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain.
- 2) Orientasi terhadap kekuasaan.
- 3) Rekrutmen pemimpin, dalam hal ini adalah cara-cara yang digunakan oleh para calon pemimpin yang tadinya hanya merupakan orang biasa untuk mendapatkan kekuasaan politik yang merupakan aspek signifikan dalam budaya politik suatu bangsa.

- 4) Gaya politik, sikap individu terhadap proses politik dan pandangannya mengenai hubungannya itu memberi perbedaan gaya pada budaya politiknya. Sehingga budaya politik yang dimiliki oleh masing-masing negara tentu berbeda satu sama lain, seperti halnya budaya politik yang terdapat di negara Indonesia juga berbeda dengan budaya politik yang terdapat di negara lain. Hal ini, sangat dipengaruhi oleh sejarah kebangsaan dan proses yang terus berlangsung dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan juga politik (Budi Winaro, 2008: 16).

B. Tinjauan Tentang Sikap

1. Pengertian Sikap

Sikap merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena adanya sikap pada diri seseorang akan membawa warna dan corak pada tingkah laku atau perbuatan seseorang tersebut. Ada banyak ahli yang mengemukakan definisi sikap. Salah satunya Thurstone memberikan pengertian yaitu: sikap sebagai suatu tingkatan efek baik itu positif maupun dalam berhubungan dengan obyek-obyek psikologi. Efek yang positif yaitu efek senang dengan demikian adanya sikap menerima atau setuju. Sedangkan efek negatif adalah sebaliknya yaitu adanya sikap menolak atau tidak senang (Abu Ahmadi, 2002: 163).

Sikap merupakan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi baru merupakan kecenderungan. Dari

suatu sikap tertentu diperkirakan tindakan atau perilaku yang akan dilakukan berkenaan dengan objek yang dimaksud (Sudijono Sastroadmojo, 1995:4).

Berdasarkan pengertian sikap yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kecenderungan untuk memberikan tanggapan atau respon baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif terhadap objek tertentu.

2. Ciri-Ciri Sikap

Sikap merupakan jenis atau tabiat tingkah laku dalam hubungannya dengan perangsang yang relevan, dapat dikatakan bahwa sikap merupakan faktor internal, tetapi tidak semua faktor internal adalah sikap. Adapun ciri-ciri yaitu:

- a. Sikap bukan dibawa orang sejak dilahirkan, melainkan dibentuk dan dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya;
- b. Sikap itu dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang, atau sebaliknya, sikap itu dapat dipelajari karena itu sikap dapat berubah-ubah pada orang-orang bila terdapat keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya sikap pada orang itu;
- c. Sikap itu berdiri sendiri, akan tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk, dipelajari atau dirubah;

- d. Objek sikap dapat merupakan suatu hal tertentu, akan tetapi dapat merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut;
- e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan;

Dari pemaparan di atas, dengan kata lain ciri-ciri sikap dapat disimpulkan yaitu keadaan yang telah ada sejak lahir tetapi dapat berubah-ubah dimana keadaan tersebut terbentuk dari pembelajaran (Gerungan, 2004: 151).

3. Fungsi Sikap

Fungsi sikap dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok

- a. Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Bahwa sikap adalah sesuatu yang bersifat *communicable*, artinya sesuatu yang mudah menular, sehingga mudah pula dimiliki bersama. Justru karena itu suatu golongan yang mendasarkan atas kepentingan bersama dan pengalaman bersama biasanya ditandai oleh adanya sikap anggotanya yang sama terhadap suatu objek.
- b. Sikap berfungsi sebagai alat pengukur tingkah laku, bahwa tingkah laku timbul karena hasil pertimbangan-pertimbangan dari perangsang-perangsang yang tidak reaksi secara spontan, akan tetapi terdapat proses yang secara sadar untuk menilai perangsang-perangsang tersebut. Jadi antara perangsang dan reaksi disiapkannya sesuatu yang berwujud pertimbangan-pertimbangan terhadap perangsang itu sebenarnya.

- c. Sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman, bahwa manusia dalam menerima pengalaman-pengalaman dari luar yang sikapnya tidak pasif, tetapi diterima secara aktif, artinya semua pengalaman yang berasal dari luar tidak sepenuhnya dilayani oleh manusia, tetapi manusia memilih mana-mana yang perlu dan tidak perlu dilayani. Jadi semua pengalaman ini diberi penilaian, lalu dipilih.
- d. Sikap politik berfungsi sebagai pernyataan pribadi. Sikap sering mencerminkan pribadi seseorang. Ini sebabnya bahwa sikap tidak pernah terpisah dari pribadi yang mendukungnya. Oleh karena itu dengan melihat sikap-sikap pada objek-objek tertentu, sedikit banyak orang dapat mengetahui pribadi orang tersebut. Jadi disimpulkan bahwa sikap merupakan pernyataan pribadi.

Fungsi sikap dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkah laku seseorang sebagai alat untuk menyesuaikan diri terhadap pernyataan objek tertentu yang berasal dari pengalaman-pengalaman seseorang sehingga menciptakan sebuah pernyataan pribadi sebagai cerminan dari kepribadian orang tersebut (Ahmadi, 2002: 179).

4. Komponen-Komponen Sikap

Sikap terdiri atas tiga komponen. Ketiga komponen sikap terdiri dari :

- a. Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Komponen kognitif ini dapat disamakan dengan

pandangan (opini), terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial.

- b. Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Aspek emosional ini lah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin akan merubah sikap seseorang.
- c. Komponen evaluatif berisi orientasi politik seseorang ditentukan oleh evaluasi moral yang telah dimiliki seseorang. Dalam hal ini norma-norma yang dianut akan menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap kehadiran sistem politik. Almod dan verba dalam Sudjino Sastroatmodjo (1998:37-38).

Selanjutnya sikap diartikan sebagai kesiapan merespon yang sifatnya positif, negatif dan netral terhadap objek atau situasi secara konsisten.

Adapun definisi sikap sikap positif, sikap negatif, dan netral adalah:

- a. Sikap positif adalah sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, meneima, mengakui, menyetujui serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.
- b. Sikap negatif adalah sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.
- c. Sikap netral adalah sikap masyarakat yang tidak menunjukkan sikap setuju atau menolak (Abu Ahmadi (2002: 163).

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembentukan dan Perubahan Sikap

Sikap terbentuk dalam perkembangan individu, karena faktor pengalaman individu mempunyai peranan sangat penting dalam rangka pembentukan sikap individu yang bersangkutan. Namun demikian, pengaruh luar itu sendiri belum cukup untuk meyakinkan dan menimbulkan atau membentuk sikap tersebut. Sekalipun diakui bahwa faktor pengalaman adalah faktor yang penting. Karena itu dalam pembentukan sikap, faktor individu sendiri akan ikut serta membentuk terbentuknya sikap tersebut.

Perubahan sikap ditentukan oleh dua faktor yang pokok, yaitu:

a. Faktor Internal

Yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor ini berupa *selectivity* atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.

b. Faktor eksternal

Yaitu faktor yang terdapat diluar pribadi manusia. Faktor ini berupa interaksi sosial diluar kelompok misalnya : interaksi antara manusia yang dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai padanya melalui alat-alat komunikasi seperti: surat kabar, radio, televisi, majalah dan lain sebagainya (Abu Ahmadi, 2002:178).

C. Tinjauan Tentang Sikap Politik

1. Sikap Politik

Sikap politik adalah sikap dan tingkah laku kecenderungan seseorang untuk bertindak (diam juga merupakan sikap) terhadap situasi atau keadaan. Adanya rasa terdorong untuk mengubah suasana lingkungan yang ditentukan oleh apa yang terkandung dalam dirinya sendiri seperti idealisme, nasionalisme dan lain-lain (Alfian, 1982:134-135).

Menurut Soewondo sikap politik diartikan sebagai kesiagaan mental yang diorganisir lewat pengalaman yang mempunyai pengaruh tertentu kepada tanggapan seseorang terhadap orang lain. Objek, situasi yang berhubungan dengannya, menurut ahli tersebut sikap mempunyai hubungan yang erat dengan nilai dalam arti bahwa nilai-nilai dapat digunakan sebagai suatu cara untuk mengeluarkan jumlah sikap. Sikap, seseorang dapat menyatukan perasaan setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, dan pola yang menentukan pandangan tentang dunia (Dedi Kurniawan, 2012:22).

Sikap politik dapat dinyatakan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut. Adanya sikap politik tersebut akan diperkirakan perilaku politik apa yang sekiranya akan muncul. Akan tetapi, perilaku politik juga tidak selamanya mewakili sikap politik seseorang (Sastroatmodjo, 1995:4-7).

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, sikap politik dalam penelitian ini adalah sikap politik yang bersifat internal yang diwujudkan dalam bentuk tanggapan atau pendapat-pendapat untuk bereaksi terhadap objek atau situasi politik, sebagai hasil dari penghayatan dari individu dalam masyarakat yang melibatkan komponen kognitif, afektif, dan evaluatif terhadap objek atau situasi politik.

2. Komponen Sikap Politik

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik atau suatu objek politik, Almond dan Verba dalam Sudjino Sastroatmodjo (1998:37-38) mengungkapkan tiga komponen, yaitu:

- a. Komponen kognitif, yaitu komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya.
- b. Komponen afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya.
- c. Komponen evaluatif, yaitu keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, sikap politik dalam penelitian ini adalah sikap politik yang bersifat internal yang diwujudkan dalam bentuk tanggapan atau pendapat-pendapat untuk bereaksi terhadap objek atau situasi politik, sebagai hasil dari penghayatan dari individu

dalam masyarakat yang melibatkan komponen kognitif, afektif, dan evaluatif terhadap objek atau situasi politik.

3. Pengertian Kiai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Kiai memiliki banyak arti: 1). Sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai di agama Islam), 2). Alim Ulama: para-ikut terjun ke kancah peperangan sewaktu melawan penjajah, 3). Sebutan bagi guru ilmu gaib (dukun, dan sebagainya), 4). Kepala distrik (di Kalimantan Selatan), 5), Sebutan yang mengawali nama benda yang dianggap bertuah (senjata, gamelan, dan ebagainya), 6). Sebutan samara untuk harimau (jika orang melewati hutan).

Menurut asal usul bahasa, perkataan Kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk 3 jenis gelar yang berbeda. Ketiga makna tersebut adalah:

- 1) Gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat
- 2) Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya
- 3) Gelar yang dierikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama (Islam) yang memiliki atau menjadi pemimpin pondok pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya (Sama'un Bakry 2005:162).

Kiai dalam pengertian itulah yang dimaksud kata kiai dalam elemen pesantren. Di pondok pesantren, kiai merupakan elemen terpenting. Kiai adalah pendiri dan sekaligus pengembang pondok pesantren. Ketergantungan orang yang terlibat dalam pondok pesantren terhadap kiai sangat besar, sehingga kiai akan menjadi penentu diterima atau tidaknya pendidikan ini di tengah masyarakat (Sama'un Bakry 2005:163).

Gelar kiai tidak diusahakan melalui jalur-jalur formal sebagai sarjana misalnya, melainkan datang dari masyarakat yang secara tulus memberikannya tanpa intervensi pengaruh-pengaruh pihak luar. Kehadiran gelar ini akibat kelebihan-kelebihan ilmu dan amal yang tidak dimiliki lazimnya orang, dan kebanyakan didukung pesantren yang dipimpinnya. Oleh karena itu Kiai menjadi panutan bagi masyarakat sekitar terutama yang menyangkut kepribadian utama.

Kiai memainkan peranan yang lebih dari sekedar seorang guru. Ia bukan sekedar menempati dirinya sebagai pengajar dan pendidik santri-santrinya, melainkan aktif memecahkan masalah-masalah krusial yang dihadapi masyarakat. Ia memimpin kaum santri, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada mereka, menenangkan hati seseorang yang sedang gelisah, menggerakkan pembangunan, memberikan ketetapan hukum tentang berbagai masalah aktual, bahkan tidak jarang ia bertindak sebagai tabib dalam mengobati penyakit yang diderita orang yang memohon bantuannya. Maka Kiai mengemban tanggung jawab moral spiritual selain kebutuhan materil. Tidak berlebihan jika terdapat penilaian bahwa figur Kiai sebagai pemimpin kharismatik menyebabkan hampir segala masalah masyarakat yang terjadi di sekitar harus dikonsultasikan lebih dahulu kepadanya sebelum mengambil sikap terhadap permasalahan tersebut (Mujamil Qomar, 2006:28).

4. Pengertian Santri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Santri memiliki dua arti 1. Orang yang mendalami agama Islam, 2. Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh : orang yang soleh. Sedangkan pesantren adalah asrama tempat santri atau murid-murid belajar mengaji, dan sebagainya:pondok (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996:878).

Istilah santri yang mula-mula dan biasanya memang dipakai untuk menyebut murid yang mengikuti pendidikan islam, merupakan perubahan bentuk terhadap kata Indha shastri, yang berarti orang yang tau kitab-kitab (Hindu), seorang ulama. Adapun kata Sathri dengan dibubuhi pe- dan akhiran – an, berarti sebuah pendidikan islam tradisional atau pondok para siswa muslim sebagai model islam di Jawa. Guru pesantren disebut kiai yaitu orang tua terhormat atau guru agama yang mandiri dan beribawa (Zainimuhtharom, 1998:6).

Pendapat lain mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, persisnya dari kata cantrik yang artinya seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru ini pergi menetap. Tentunya dengan tujuan dapat belajar darinya mengenai suatu keahlian (Nurcholish Madjid 1997:20).

Dari pendapat diatas dapat ditarik sebuah keterangan bahwa yang dimaksud dengan santri adalah seorang yang belajar dipondok pesantren.

5. Hubungan Nahdlatul Ulama (NU), dan Pondok pesantren

Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren bagaikan dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Apabila menyebut Nahdlatul Ulama (NU) sudah pasti kita mesti ingat pondok pesantren dan sebaliknya, karena yang mendirikan Nahdlatul Ulama adalah para ulama pondok pesantren. Memiliki kesamaan wawasan, pandangan, sikap, perilaku dan tata cara pemahaman serta pengalaman ajaran agama agama Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah. Ibarat sebuah keranjang, kelahiran Nahdlatul Ulama tidak ubahnya mewadai sesuatu yang sudah ada, yaitu kebangkitan para ulama pondok pesantren. Wajar saja jika dikatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah organisasinya masyarakat pesantren.

Hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan pondok pesantren dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kesamaan tujuan yaitu melestarikan ajaran islam Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan materi pokok pengajaran agama di pondok pesantren.
- b. Nahdlatul Ulama didirikan sebagai wadah bagi usaha mempersatukan langkah para ulama pondok pesantren di dalam

- mengembangkan tugas pengabdianya dalam masyarakat, baik dibidang agama, pendidikan, ekonomi, maupun persoalan-persoalan kemasyarakatan yang lainnya.
- c. Pola kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama sama dengan pola kepemimpinan di pondok pesantren yang terpusat pada kiai. Jika dipondok pesantren kiai memiliki kedudukan sangat menentukan, maka didalam Nahdlatul Ulama dikenal pengurus Syuriah yang terdiri dari para ulama selaku pimpinan tertinggi.
 - d. Pengaruh yang dimiliki oleh para kiai pengasuh pondok pesantren di lingkungan masyarakatnya juga menjadi kekuatan pendukung bagi Nahdlatul Ulama. Basis massa (anggota) yang dikenal dengan satuan “kaum santri” menjadi salah satu pilar penyangga kekuatan Nahdlatul Ulama, bahkan menjadi salah satu ciri khas yang membedakannya dengan organisasi-organisasi Islam lainnya di Indonesia.

D. Tinjauan Tentang Pondok Pesantren

1. Definisi Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan keagamaan yang tumbuh dan berkembang di pedesaan. Kehadirannya adalah merupakan hasil refleksi keinginan yang telah disepakati antara pimpinan pondok pesantren (kiai) dengan masyarakat sekitarnya. Disamping sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren juga merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang diharapkan dapat membantu dalam

menyebarkan inovasi pembangunan kepada masyarakat, supaya pesantren dan partisipasi mereka dapat diinventarisir sedemikian rupa dan dimanfaatkan (Sahal, 1999:60).

Pondok pesantren pada dasarnya adalah sebuah lembaga pendidikan Islam dan ia mempunyai fungsi tambahan yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi pendidikan tersebut. Pondok pesantren merupakan sarana informasi, komunikasi timbal balik secara kultural dengan masyarakat, tempat pemupukan solidaritas masyarakat dan seterusnya (Abdurahman, 2001:157).

Pondok pesantren dihadapkan pada tantangan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa, selain tantangan tersebut pondok pesantren saat ini juga dihadapkan pada kenyataan untuk terlibat dalam kehidupan politik. Terutama dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan tradisional yang juga sekalipun sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang keberadaannya tidak terlepas dari masyarakat sekitar.

2. Pola pendidikan

Dalam perkembangan selanjutnya pondok pesantren berkembang menjadi dua macam jenis yaitu pondok pesantren modern dan pondok pesantren tradisional. Perubahan yang tampak pada sistem pengajaran dan pendidikan

pondok pesantren adalah dari pondok pesantren murni berubah atau ditambah dengan sistem madrasah (Mufti Ali, 1991:9).

Pada pondok pesantren tradisional tidak mengenal sistem kelas. Kemampuan siswa tidak dilihat dari tingkat kelasnya tapi dilihat dari kitab apa yang telah dibacanya. Kitab-kitab yang dibaca diklasifikasikan berdasarkan tingkat-tingkat. Ada tingkat awal, menengah dan atas. Untuk mengajarkan kitab-kitab klasik tersebut seorang kiai menempuh cara : wetonan, sorogan dan hafalan. Bagi pondok pesantren yang tergolong pondok pesantren modern, metode sorogan dan wetonan bukanlah satu-satunya metode pengajaran, mereka telah mempergunakan metode-metode pengajaran sebagaimana yang dipergunakan pada sekolah-sekolah umum” (Haidir Putra Dauliy, 2001:10-11).

3. Tipe pondok Pesantren

Dalam perkembangan selanjutnya bentuk-bentuk pendidikan di pondok pesantren ini, kini sangat bervariasi, yang dapat diklasifikasikan sedikitnya menjadi lima tipe, yaitu:

- a. Pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal yang menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA dan PT Agama Islam) maupun yang juga memiliki sekolah umum (SD, SLTP, SMU, SMK, dan Perguruan Tinggi Umum), seperti pesantren Tebu Ireng Jombang, pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dan pesantren Syafi’iyyah Jakarta.

- b. Pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional, seperti pesantren Gontor Ponorogo, pesantren Maslakul Huda Kajen Pati (Matholi'ul Falah) dan Darul Rahman Jakarta.
- c. Pondok pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah, seperti pesantren Salafiyah Langitan Tuban, Lirboyo Kediri dan pesantren Tegalrejo Magelang.
- d. Pondok pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian (majlis ta'lim), dan
- e. Kini mulai berkembang pula nama pesantren untuk asrama anak-anak pelajar sekolah umum dan mahasiswa.

Maraknya pendidikan pondok pesantren tipe ke-5 (Pesantren Mahasiswa) yang muncul sejak dekade 80-an ini sebenarnya menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik untuk dicermati. Hal ini bukan saja karena usia yang masih relatif muda, akan tetapi manajemen atau pengelolaan pesantren mahasiswa memiliki spesifikasi tersendiri. Berbeda dengan pesantren pada umumnya yang rata-rata menyelenggarakan pendidikan keagamaan untuk jenjang pendidikan dasar sampai menengah saja, pendidikan di pesantren yang telah digolongkan kedalam tipe 5 tipe diatas, maka pondok pesantren Al-Hikmah masuk kedalam tipe pertama yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal yang menerapkan kurikulum nasional, yang didalam pesantren memiliki sekolah umum (SMP dan SMA).

4. Nilai-nilai Pondok Pesantren

Segala aktifitas kehidupan pondok pesantren selalu mendasarkan pada nilai-nilai kebenaran keagamaan, setidaknya ada dua kelompok nilai kebenaran yang menjadi dasar kehidupan pondok pesantren yaitu:

- a. Nilai-nilai agama yang memiliki kebenaran mutlak, yang dalam hal ini bercorak fiqih suftistik, dan berorientasi pada kehidupan ukhrowi.
- b. Nilai-nilai agama yang memiliki kebenaran relatif, bercorak empiris dan pragmatis untuk memecahkan berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari menurut hukum agama (Mastuhu, 1994:58).

Kedua kelompok nilai ini mempunyai hubungan yang hirarkis vertikal. Kelompok nilai pertama superior atas kelompok nilai kedua dan kelompok nilai kedua tidak boleh bertentangan dengan kelompok nilai pertama.

Dalam hal ini kiai dipercaya dapat menjaga dapat menjaga nilai-nilai agama kelompok pertama, sedangkan santri dan ustad lain menjaga kelompok nilai-nilai agama kedua. Hal inilah yang pada akhirnya melahirkan ketaatan, ketundukan yang penuh kepada kiai atas dasar keyakinan bahwa seorang kiai tidak mungkin salah dan keliru dengan kata lain akan selalu benar dalam setiap tindak tanduknya. Dan nilai-nilai yang dianggap akan mempengaruhi sikap politik kiai dan santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah.

5. Fungsi Pondok Pesantren

Pondok pesantren selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga penyiaran agama.

- a. Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum dan perguruan tinggi) dan pendidikan nonformal yang secara khusus mengajarkan agama.
- b. Sebagai lembaga sosial, pondok pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membeda-bedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif murah, bahkan bagi santri yang yatim piatu atau berasal dari keluarga kurang mampu biasanya ibebaskan dari pungutan biaya. Beberapa orang tua sengaja menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh kiai. Mereka percaya penuh bahwa seorang kiai tidak akan menyesatkan, justru sebaliknya dengan berkah iai anak yang nakal dapat berubah menjadi baik.
- c. Sebagai lembaga penyiaran agama, masjid pondok pesantren berfungsi sebagai masjid umum yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah bagi masyarakat umum. Masjid pesantren sering digunakan untuk menyelenggarakan majlis taklim, diskusi-diskusi keagamaan dan lain sebagainya oleh masyarakat umum (Mastuhu, 1992:59-61).

Sehubungan dengan tiga fungsi pesantren tersebut, maka pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya, dan menjadi rujukan moral bagi kehidupan masyarakat termasuk dalam hal ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan politik. Hal ini lebih

disebabkan karena masyarakat memandang pondok pesantren sebagai komunitas khusus yang ideal terutama dalam bidang kehidupan moral keagamaan.

Ketiga unsur tersebut merupakan satu-kesatuan yang utuh dan bulat. Meskipun demikian tampak bahwa fungsinya sebagai lembaga pendidikan menjadi semacam sebuah ujung tombaknya, sedangkan sebagai lembaga sosial dan lembaga penyiaran agama menjadi sayap-sayap sebelah kiri dan kanan (Mastuhu, 1994:61).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, pondok pesantren modern adalah pondok pesantren yang di dalam sistem pendidikan dan pengejaran telah memasukkan sistem madrasah atau bentuk sekolah umum dengan menambahkan kurikulum pendidikan dari Departemen Pendidikan Nasional. Dalam penelitian ini yang merupakan pesantren modern adalah pesantren AL-Hikmah.

Pondok Pesantren tradisional adalah pondok pesantren yang melakukan pola pendidikan lama seperti sorogan, tarekat/wetonan dan bandongan tanpa memasukkan sistem pengajaran dan kurikulum umum seperti sekolah atau madrasah.

E. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk memilih para pejabat politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Rudini dan Archana Sutomon (2007:25) menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan sarana demokrasi

untuk membuat suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa pemilihan umum itu tiada sebagai alat atau sarana untuk mengembangkan demokrasi. Selanjutnya T. May Rudi memberikan penjelasan mengenai pemilihan umum yaitu, "Pemilu adalah pengewanjataan sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan". Asas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut UU No.1 Tahun 2015 Pasal 2 Pemilu dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil menurut UU No. 1 Tahun 2015 pasal 5 yaitu:

- (1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - d. Pembentukan PPK, PPS, DAN KPPS;
 - e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
 - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; dan
 - g. Penyerahan daftar penduduk potensi pemilih.

- (3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendaftaran bakal calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - b. Uji Publik;
 - c. Pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - d. Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - e. Penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - f. Penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - g. Pelaksanaan Kampanye;
 - h. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - j. Penetapan calon terpilih;
 - k. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
 - l. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

F. Kerangka Pikir

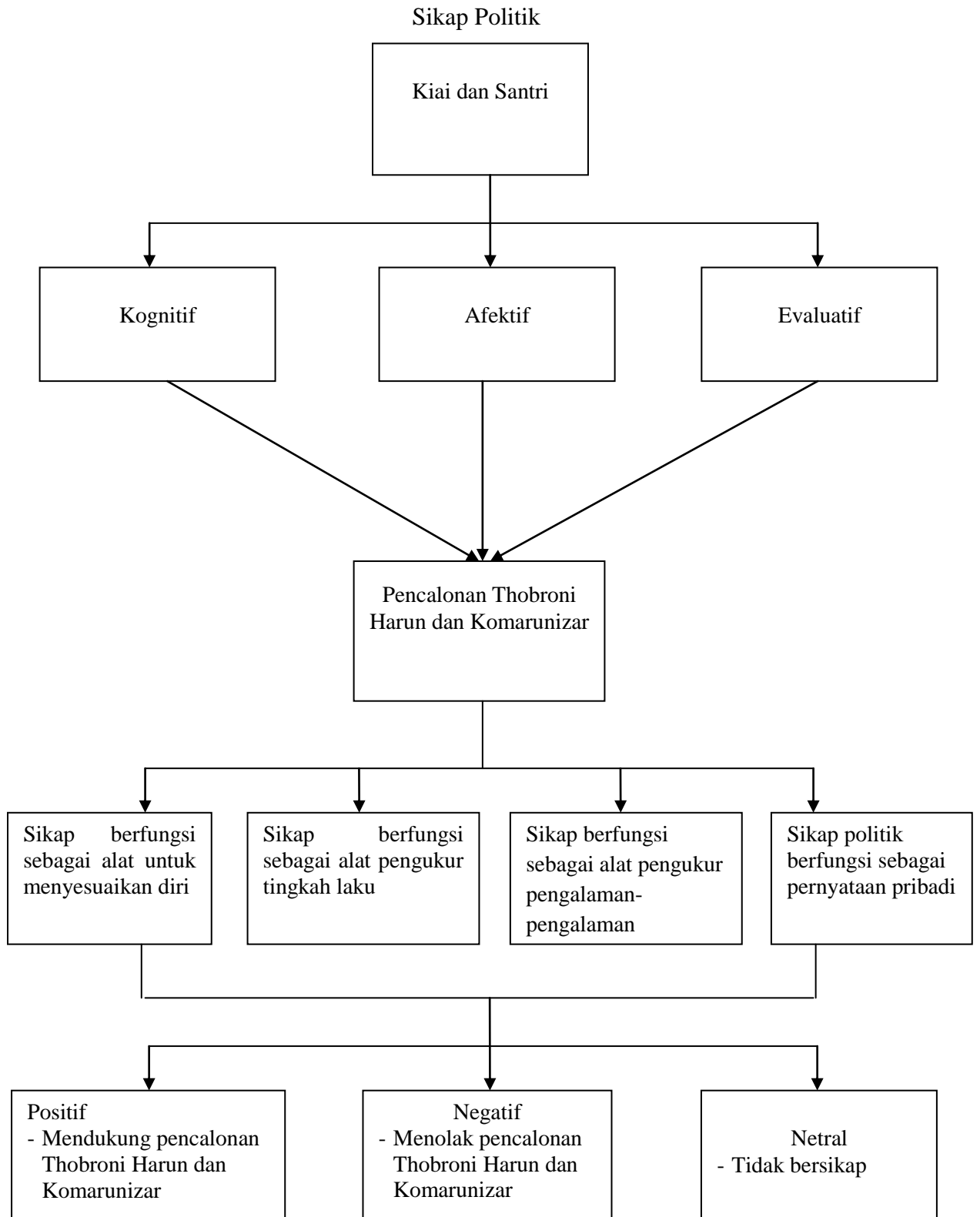
Kiai dalam masyarakat kita memiliki posisi penting dan strategis lantaran otoritas keilmuan yang dimiliki dan peran masyarakatan, keagamaan yang diembannya. Kiai dipandang menempati kedudukan otoritas keagamaan, oleh karena itu kiai dihormati oleh masyarakat, pendapat mereka dianggap mengikat dalam berbagai masalah bukan hanya menyangkut masalah keagamaan melainkan masalah-masalah lainnya.

Pentingnya posisi kiai dalam masyarakat Islam terletak pada kenyataan bahwa mereka bisa dipercaya dan diandalkan, karena pengetahuan agama yang mendalam dan ketinggian akhlak, kiai bergerak pada berbagai lapisan sosial masyarakat. Kiai memiliki kekuatan dan pengaruh besar sebagaimana diketahui keberadaan pengetahuan merupakan modal penting yang menghasilkan kekuasaan dan pengaruh tertentu dalam sebuah komunitas.

Kiai menuntut pengetahuan demi kekuasaan yang dapat diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan atau tidak, konsepsi masyarakat yang melekat pada pengetahuan agama telah memberikan dasar yang kuat bagi kesinambungan pengaruh moral kiai. Namun kenyataan memperlihatkan bahwa banyak kiai enggan mewujudkan kekuasaan mereka secara langsung kedalam ranah politik yang sifatnya praktis. Kekuatan dan pengaruh mereka lazimnya diekspresikan secara politik dan intelektual dalam bentuk komitmen, keteguhan, dan kewaspadaan untuk melihat, mengawasi apakah penguasa dan masyarakat telah bertindak sesuai dengan pemahaman dan interpretasi mereka tentang Islam.

Tingkat kedekatan kiai dengan penguasa tentu saja bersifat dinamis, dalam arti mengalami pasang surut dan pergerakan yang tidak dapat di tebak. Kiai dapat memerankan peran secara leluasa di pusaran kekuasaan. Keikutsertaan pasangan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung dimana Komarunizar yang merupakan seorang kiai dan sedang menjabat sebagai Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandar Lampung. Pada pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Bandar Lampung tahun 2015 apakah kiai menyebabkan dan memberi pengaruh terhadap pilihan politik santri. Bisa saja para santri terpengaruh oleh sikap politik kiai tersebut, atau mereka bisa saja memilih bukan dari kalangan kiai. Untuk memudahkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teori sikap politik. Bagan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini mutlak diperlukan adanya suatu metode yang dapat memberikan arah bagi peneliti sehingga tidak keluar dari jalur penelitian yang telah direncanakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Alasan penggunaan metode deskriptif kualitatif tentang sikap politik kiai dan santri pondok pesantren Al-hikmah terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 adalah karena fakta, hambatan, kendala ini nantinya akan lebih mudah di analisis dengan melakukan penggambaran secara mendalam untuk kemudian didapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan tentang sikap politik kiai dan santri pondok pesantren al-hikmah terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.

Nawawi (2001: 63), mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai berikut:

Penelitian deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisa hanya pada sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.

Menurut Nazir (2003: 54), adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Disamping itu menggunakan teori-teori, data-data, dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam tentang data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu.

Penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini untuk menggambarkan fenomena mengenai keseluruhan proses dari permasalahan yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh dan berusaha untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam proses tersebut. Tidak terlepas dari pokok permasalahan, maka alasan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimanakah sikap politik kiai dan santri terhadap

pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian dipandang penting, karena adanya fokus penelitian akan membatasi studi. Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi. Jadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk melihat sikap politik Kiai dan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung yang akan dinilai dari 3 indikator. Indikator-indikator tersebut sebagai berikut:

a. Aspek Kognitif (Pengetahuan)

- 1) Pengetahuan Kiai dan Santri terhadap waktu pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.
- 2) Pengetahuan Kiai dan Santri terhadap figur Thobroni Harun dan Komarunizar terhadap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.
- 3) Pengetahuan Kiai dan Santri terhadap visi dan misi Thobroni Harun dan Komarunizar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.
- 4) Pengetahuan Kiai dan Santri terhadap Latar Belakang Thobroni Harun dan Komarunizar.

b. Afektif (Perasaan)

- 1) Perasaan Kiai dan Santri terhadap waktu pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.
- 2) Perasaan Kiai dan Santri terhadap figur Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.
- 3) Perasaan Kiai dan Santri terhadap visi dan misi Thobroni Harun dan Komarunizar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.
- 4) Perasaan Kiai dan Santri terhadap Latar Belakang Thobroni Harun dan Komarunizar.

c. Aspek Evaluatif (Penilaian)

- 1) Penilaian Kiai dan Santri terhadap waktu pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.
- 2) Penilaian Kiai dan Santri terhadap figur Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.
- 3) Penilaian Kiai dan Santri terhadap visi dan misi Thobroni Harun dan Komarunizar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.
- 4) Penilaian Kiai dan Santri terhadap Latar Belakang Thobroni Harun dan Komarunizar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.

Adapun sikap tersebut terbagi tiga yaitu positif (mendukung pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015 dan bagaimana tindakannya mengenai pencalonan Thobroni dan Komarunizar tersebut), Negatif (menolak, pencalonan Thobroni harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015 dan bagaimana tindakannya mengenai pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar tersebut), Netral (tidak bersikap).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dan waktu dalam penelitian ini dilakukan pada:

Lokasi penelitian dilakukan dipondok pesantren Al-Hikmah Kota Bandar Lampung.

Tabel 3. Informan dan Waktu Penelitian

No. (1)	Informan (2)	Waktu Penelitian (3)
1.	Santri yang menetap dipondok pesantren Al-Hikmah	2 Maret 2016
2.	Santri kalong	2 Maret 2016
3.	Kiai dipondok pesantren Al-Hikmah	7 April 2016
4.	Ustad Ihwanudin Nazir	31 Mei 2016

Sumber : Data diolah 2016

Pada tanggal 2 Maret 2016 peneliti melakukan penelitian dipondok pesantren Al-Hikmah dengan santri yang menetap dipondok pesantren Al-Hikmah dan santri kalong, selanjutnya pada tanggal 7 April 2016 Peneliti melakukan penelitian dipondok pesantren Al-Hikmah dengan kiai Abdul Aziz. Selanjutnya peneliti mewawancarai ustad Ihwanudin sebagai penengah

kebenaran atas informasi yang didapatkan oleh peneliti pada tanggal 31 Mei 2016.

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data yang telah diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara) langsung. Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait isu/pokok masalah dalam penelitian kepada informan. Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan informan. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data terkait tentang sikap politik kiai dan santri pondok pesantren Al-Hikmah terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015 yang akan didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen, catatan-catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai profile pondok pesantren Al-Hikmah, struktur organisasi, foto-foto kegiatan yang dilakukan saat melakukan

penelitian dipondok pesantren, serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang dimiliki oleh pondok pesantren Al-Hikmah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung antara informan dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data.

Proses wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu peneliti memberikan batasan pertanyaan terhadap informan dengan sudah mempersiapkan pertanyaan secara tertulis, sehingga proses wawancara dan apa yang akan ditanyakan tidak menyimpang dari fokus dan tujuan dari penelitian.

Berikut merupakan data wawancara terhadap informan:

- a. Bapak Abdul Aziz, selaku Kiai di pondok pesantren Al-Hikmah yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 7 April 2016 di pondok pesantren Al-Hikmah Kota Bandar Lampung dengan hasil wawancara terlampir .
- b. Santri yang menetap di pondok pesantren Al-Hikmah yang diwawancarai oleh peneliti dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2016 di pondok pesantren Al-Hikmah Kota Bandar Lampung dengan hasil wawancara terlampir.
- c. Santri kalong, yaitu santri yang tidak menetap di pondok pesantren Al-Hikmah yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 2 Maret 2016 dengan hasil wawancara terlampir.
- d. Bapak Ihwanudin Nasir, selaku ketua asrama di pondok pesantren Al-Hikmah yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 31 Mei 2016 dengan hasil wawancara terlampir.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber data resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga/ perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Data

yang ada di pondok pesantren Al-Hikmah yaitu struktur kepengurusan pondok pesantren Al-Hikmah dan foto kegiatan saat melakukan penelitian.

F. Teknik Pengelolaan Data

Dalam suatu teknik pengelolaan data menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989: 22) memberikan penjelasan bahwa data yang telah dikumpulkan dari lapangan sebelum disajikan terlebih dahulu diolah dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap *Editing*, dalam tahap ini meneliti kembali data-data yang telah terhimpun untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan data, kesesuaian data jawaban dan keseragaman satuan data.

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data yang telah ada untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

2. Interpretasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara teoritis terhadap suatu data. Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk

kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melalui tahap editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi data dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi.

G. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan/informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan teknik bola saju (*snowball sampling*) yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau maksud tertentu. Dari informan yang mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar diperoleh informasi berhubungan dengan Sikap Politik Kiai dan Santri Terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.

Tabel 4. Deskripsi data Kiai dan Santri Pondok pesantren Al-Hikmah

No	Nama	Umur	L/P	Asal Orang Tua	Suku	Keterangan	Keterangan Santri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kiai Abdul Aziz	50	L	Lampung	Lampung	Kiai	
2.	Ustad Ihwanudin Nasir	28	L	Jawa	Jawa	Jawa	
3	Nurul Hasanah	25	P	Palembang	Jawa	Mahasiswa	Santri menetap di pondok pesantren Al-Hikmah

No	Nama	Umur	L/P	Asal Orang Tua	Suku	Keterangan	Keterangan Santri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Latifatun Hamidah	22	P	Lampung Utara	Jawa	Mahasiswa	Santri menetap di pondok pesantren Al Hikmah
5	Khamsatun	24	P	Tulang Bawang	Jawa	Mahasiswa	Santri menetap di pondok pesantren Al Hikmah
6	M. Ridho Alutfi	13	L	Sukabumi	Jawa	Tsanawiyah (SMP)	Santri menetap di pondok pesantren Al Hikmah
7	M. Thoriq	13	L	Sukarame	Jawa	Tsanawiyah (SMP)	Santri menetap di pondok pesantren Al Hikmah
8	M. Abdul Rahman	12	L	Bandar Lampung	Jawa	Tsanawiyah (SMP)	Santri menetap di pondok pesantren Al Hikmah
9	Putri Cahaya	18	P	Kalianda	Jawa	Aliyah (SMA)	Santri menetap di pondok pesantren Al Hikmah
10	Marlin Fadilah	17	P	Metro	Semendo	Aliyah (SMA)	Santri menetap di pondok pesantren Al
11	Aisyah Ambrantika	17	P	Bandar Lampung	Jawa	Aliyah (SMA)	Santri menetap di pondok pesantren Al Hikmah
12	Nurul Habibah	17	P	Tanggamus	Jawa	Aliyah (SMA)	Santri menetap di pondok pesantren Al Hikmah
13	Sahafa	17	P	Pringsewu	Jawa	Aliyah (SMA)	Santri menetap di pondok pesantren Al Hikmah
14	Zainudin	18	L	Banten	Jawa	Aliyah (SMA)	Santri menetap di pondok pesantren Al Hikmah
15	Febriansyah	18	L	Tanggamus	Lampung	Aliyah (SMA)	Santri menetap di pondok pesantren Al Hikmah

No	Nama	Umur	L/P	Asal Orang Tua	Suku	Keterangan	Keterangan Santri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Isniah Alisa	18	P	Tanggamus	Lampung	Aliyah (SMA)	Santri Kalong
17	Rizka Oktiarosa	17	P	Batu Raja	Palembang	Aliyah (SMA)	Santri Kalong
18	Rico Arnando	17	L	Bandar Lampung	Jawa	Aliyah (SMA)	Santri Kalong
19	Agung Prasetyo	18	L	Bandar Lampung	Jawa	Aliyah (SMA)	Santri Kalong
20	M. Wirza	17	L	Aceh	Aceh	Aliyah (SMA)	Santri Kalong
21	Baharudin	17	L	Banten	Sunda	Aliyah (SMA)	Santri Kalong
22	A. Mega Dian Permata	18	P	Muara Dua	Palembang	Aliyah (SMA)	Santri Kalong

Sumber : Data diolah 2016

Pada prosesnya pertama-tama peneliti datang kepada seseorang yang menurut pengetahuannya dapat dijadikan sebagai *key informan*. *Key informan* dalam penelitian ini adalah Kiai pondok pesantren Al-Hikmah karena mempunyai posisi dan peran yang penting dalam mengetahui bagaimana sikap politik kiai dan santri pondok pesantren Al-Hikmah terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 sehingga data-data yang diperoleh dapat relevan. Setelah berkomunikasi secara cukup oleh *key informan* (informan 1) yaitu kiai Abdul Aziz kemudian peneliti mewawancarai santri yang menetap di pondok pesantren Al-Hikmah dan santri kalong, hal ini dilakukan untuk melihat perbandingan terhadap santri yang menetap dan santri kalong.

Melihat sejauh mana sikap politik santri yang menetap maupun yang kalong terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015. Demikian

selanjutnya sehingga data dan keterangan yang diperoleh semakin banyak, lengkap, dan mendalam. Untuk mendapatkan data yang dapat dilihat kebenarannya dan keabsahannya peneliti mewawancarai ustad Ihwanudin Nazir selaku lurah atau ketua pondok pesantren.

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan ataupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, maka teknik analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan di lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi lainnya, meliputi:

1. *Reduksi data*, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk

analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik. Reduksi data peneliti dilakukan pada data hasil wawancara, dalam hal ini peneliti memilih kata-kata yang dapat digunakan untuk melakukan pembahasan.

Peneliti mengumpulkan data mengenai sikap politik kiai dan santri terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015. Peneliti mewawancarai informan yaitu anggota kiai dan santri di pondok pesantren Al-Hikmah dengan menggunakan pertanyaan yang sama untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti.

2. *Display data*, yaitu peneliti menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data yang didapat secara menyeluruh yang diperoleh dari lokasi hasil penelitian. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas dan terperinci serta menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi-deskriptif.

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah di reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Catatan-catatan penting dilapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan

dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Penarikan kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus dapat diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya, yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis yang peneliti lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan dan fokus penelitian ini.

Setelah melakukan reduksi data dan display data peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini. Peneliti menarik kesimpulan bahwa sikap politik kiai dan santri pondok pesantren Al-Hikmah terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015 terbukti negatif dan tidak mendukung, hal tersebut dinilai dari tiga indikator berdasarkan teori Almond dan Verba dalam Sudijono yaitu sikap individu terhadap objek politik dapat dilihat dari tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif.

Dari penilaian 3 indikator di atas maka kesimpulan yang ditarik oleh peneliti apabila digolongkan dalam sikap individu terhadap objek politik adalah kebanyakan dari mereka hanya mengetahui waktu pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tetapi tidak mendukung pasangan Thobroni Harun dan komarunizar.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitiann. Teknik keabsahan data dilakukan unntuk mendapatkan data yang valid. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informasi melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan yang valid.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan tersebut akan dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triaggulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Hikmah Kota Bandar Lampung

1. Kegiatan didalam Pondok Pesantren Al-Hikmah

Pemberian nama Al-Hikmah dilatar belakangi perjuangan Kiai Muhammad Sobari, pada akhirnya dengan perjuangan Kiai Muhammad Sobari berdirilah madrasah Al-Hikmah. Berdirinya madrasah Al-Hikmah juga untuk mengenang jasa bapak Hj. Ali Hanafiah dalam pembangunan dan pengembangan madrasah yang pada waktu itu sedang merenofasi masjid Al-Hikmah. Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung menyelenggarakan pendidikan Madrasah/Formal yaitu:

- a. Raudhatul Athfal (RA/TK) Al-Hikmah berdiri pada tanggal 17 february 1980, Akreditasi B.
- b. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Hikmah berdiri pada tanggal 17 february 1980, Akreditasi B .
- c. Madrasah Tsanawiyah (MI) Al-Hikmah berdiri pada tanggal 17 february 1980, Akreditasi B .
- d. Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah berdiri pada tanggal 17 januari 1987, Akreditasi B.

- e. Madrasah Diniyah (MADIN) Mambaul Hikmah berdiri pada tahun 1999, Awaliyah, Wustho.
- f. Taman pendidikan Al-Qur'an (TPA).

Yayasan pondok pesantren Al-Hikmah membuka untuk umum, baik santri yang akan menetap dipondok pesantren Al-Hikmah dan santri kalong. Santri yang sudah terdaftar di pondok pesantren Al-Hikmah wajib mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pihak pondok pesantren.

Kondisi yayasan pondok pesantren Al-Hikmah masih sangat bagus, karena pihak pondok sendiri rutin menjalankan kebersihan guna menjaga kebersihan pondok pesantren itu sendiri. Kegiatan rutin harian santri yang menetap dipondok pesantren Al-Hikmah pada pukul 04.00 santri sudah diwajibkan untuk bangun pagi dan persiapan sholat subuh, setelah melakukan sholat subuh santri bersiap untuk melaksanakan sholat dhuha dan mengaji. Setelah santri melaksanakan sholat dhuha dan mengaji pada pukul 07.00 santri bersiap untuk sekolah sampai pada pukul 12.00 santri melaksanakan proses belajar mengajar disekolah. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan santri setelah pulang sekolah kembali bersiap untuk melaksanakan sholat dzuhur dan semua santri bersiap untuk melaksanakan sholat zuhur dan setelah melaksanakan sholat santri kembali mengaji. Kegiatan yang dilakukan santri yang menetap dipondok pesantren memang hanya kegiatan ibadah saja dan ilmu yang didapatkan santri hanya ilmu tentang agama saja.

Kegiatan yang dilakukan santri setelah sholat maghrib sampai menunggu sholat isya santri dianjurkan untuk mengaji. Setelah santri melaksanakan sholat maghrib dan isya santri diperbolehkan beristirahat sampai pada pukul 21.00-22.00 santri melaksanakan bimbingan Al-Qur'an yang dilakukan dipondok pesantren tersebut. Kegiatan rutin yang memang wajib dilakukan oleh santri yang menetap dipondok pesantren Al-Hikmah tersebut dan santri harus wajib mengikuti segala kegiatan yang sudah dibuat oleh pihak pondok pesantren.

Pola pengelolaan pondok pesantren Al-Hikmah dilakukan untuk membuat para santrinya tertib akan peraturan yang sudah dibuat oleh pihak pondok dan jika santri melanggar dan tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat pihak pondok maka santri mendapatkan hukuman dari pihak pondok pesantren tersebut. Kegiatan dipondok pesantren masih tetap berlanjut pada kegiatan rutin mingguan santri melanjutkan mengikuti kegiatan pengajian kitab Nashoihul diniyyah dilaksanakan pada Ba'da Magrib yaitu pengajian kitab Nashoihul diniyyah, setelah itu santri lanjut melaksanakan Muhadhoroh yang dilakukan pada Ba'da isya. Proses kegiatan yang dilakukan dipondok pesantren mingguan masih berlanjut, yaitu santri harus mengikuti kegiatan yasinan dan tahlilan yang dilaksanakan setiap hari kamis Ba'da maghrib dan Ba'da Isya santri mengikuti kegiatan penelusuran minat dan bakat apa yang akan dipilih santri. Pada hari jumatnya santri membaca surat fadhilah yaitu surat Ar-Rahman, Waqiah dan Al-Mul. Kegiatan rutin mingguan yang harus dijalankan oleh santri yang menetap dipondok pesantren Al-Hikmah.

Santri yang menetap wajib mengikuti kegiatan harian, mingguan yang dilaksanakan pihak pondok pesantren, tidak hanya kegiatan harian dan mingguan tetapi ada juga kegiatan bulanan yang harus dijalankan oleh santri yang menetap dipondok pesantren. Kegiatan bulan berupa kegiatan yang tentatif dimana kegiaytan tersebut dilaksanakan untuk memberikan penyuluha, pengarahan dari pihak pondok kepada santri yang menetap dipondok pesantren. Adapun kegiatan lainnya yaitu penyuluhan PHBI bersama masyarakat, bakti sosial olahraga, ziarah wali 9, harlah pondok pesantren, dan yang terakhir akhirusannah. Oleh karena itu santri yang menetap lebih banyak melaksanakan kegiatan di dalam pondok pesantren, hal ini lah yang wajib diikuti oleh semua santri yang menetap dipondok pesantren Al-Hikmah, baik pada kegiatan harian, mingguan, serta bulanan.

Kegiatan yang dilakukan oleh santri kalong sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh santri yang menetap dipondok pesantren, jika santri menetap dari pukul 04.00 sudah bersiap untuk melaksanakan sholat subuh tetapi untuk santri kalong santri memulai aktivitasnya dari pukul 07.00 yaitu sekolah. Sekolah yang dilaksanakan dari pukul 07.00 sampai pukul 13.00, kemudian santri diperbolehkan untuk pulang. Berbeda memang dengan santri yang menetap dipondok pesantren karena kegiatan yang dilakukan oleh santri kalong hanya didalam sekolah saja dan santri diperbolehkan pulang kerumahnya masing-masing. Pelajaran yang didapatkan tidak jauh berbeda dengans antri yang menetap dipondok pesantren yaitu pelajaran umum dan tentang ilmu agama.

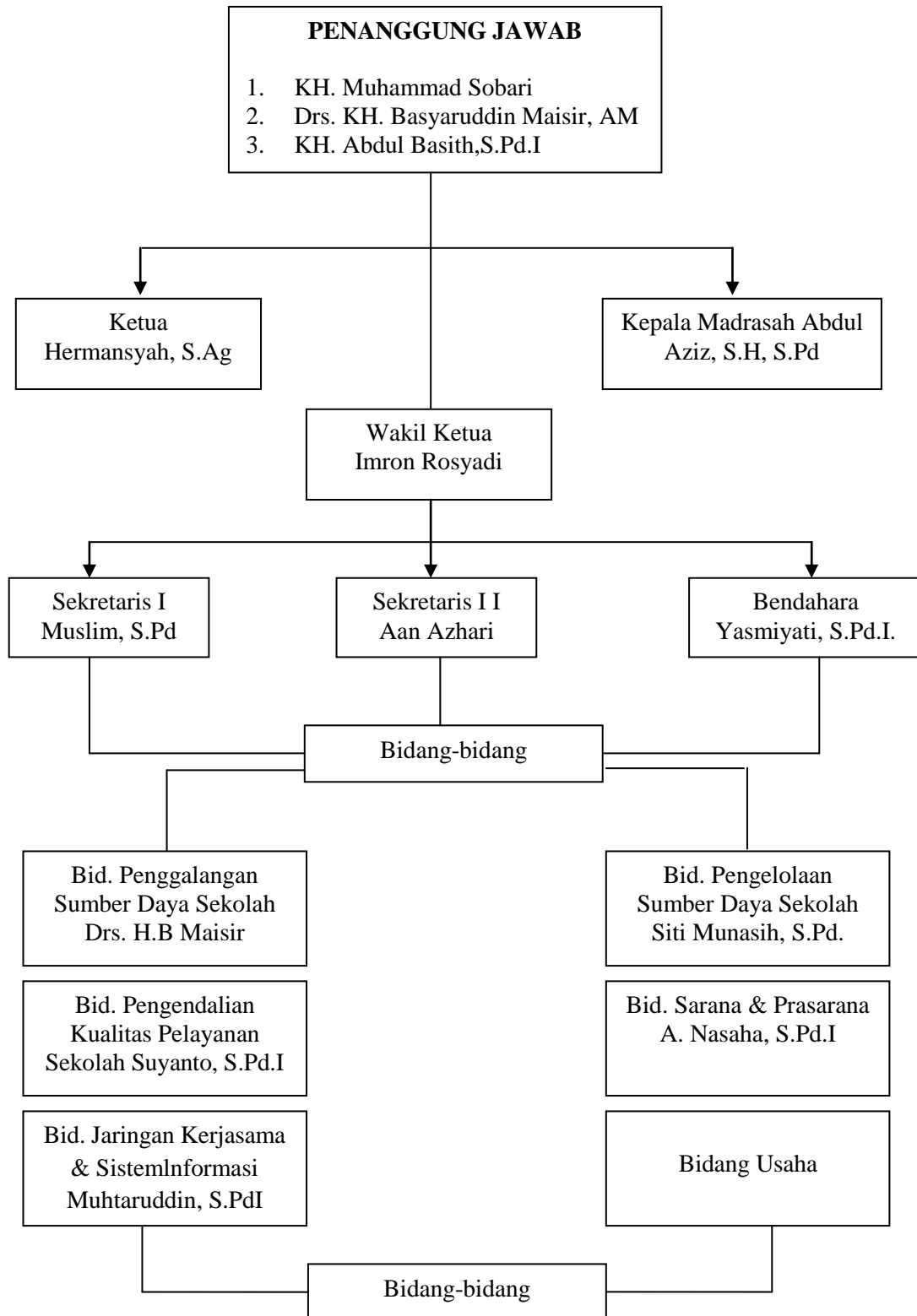
Santri yang menetap dipondok pesantren Al-Hikmah dan antri kalong tidak mendapatkan pendidikan politik dari pihak pondok melainkan mendapatkan pendidikan umum dan pendidikan tentang ilmu agama saja.

Sistematika belajar yang diberikan pihak pondok yaitu berupa pendidikan umum dan pendidikan tentang ilmu agama. Pelajaran umum yang diajarkan oleh yaitu pelajaran tentang pendidikan Agama Islam, yaitu Al-Qur'an Hadis, akidah akhlak, fiqih, dan sejarah kebudayaan Islam. Sementara itu untuk pelajaran umum yang diberikan tidak jauh berbeda dengan sekolah pada umumnya yaitu pelajaran ppkn, bahasa indonesia, bahasa arab, matematika ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial dan bahasa inggris. Akan tetapi pihak pondok juga memberikan pelajaran seni budaya, penjas orkes, prakarya dan aswaja/ ke-NU-an.

2. Struktur Pondok Pesantren Al-Hikmah

Pola pengelolaan Pondok Pesantren Al Hikmah pada dasarnya diselenggarakan secara kolektif dan memberikan peluang kepada masyarakat dan keluarga untuk berperan secara aktif demi kemajuan Pondok Pesantren. Yang dimaksud kepemimpinan Kolektif disini adalah Kiyai merupakan pemegang otonomi tertinggi dibantu oleh Pelaksana Harian (PLH). Yang dalam melaksanakan program, diangkatlah Pimpinan Lembaga-lembaga, Pimpinan-pimpinan Bidang, Karyawan, Guru dan Pengurus Pesantren sesuai kebutuhan dan kemaslahatan. Para santri juga membentuk kelompok-kelompok untuk menyalurkan bakat dan minat.

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi pondok pesantren Al Hikmah



Bagan Struktur Organisasi Pondok Pesantren Al Hikmah Hikmah

B. Gambaran Umum tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015

Pemilihan Umum Walikota Kota Bandar Lampung adalah pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih Walikota Bandar Lampung dan Wakil Walikota Bandar Lampung untuk periode 2016-2021. Untuk pertamakalinya, pemerintah menggelar Pemilihan Kepala Daerah 2015 serentak diseluruh Indonesia. Ada sebanyak 269 daerah yang akan mengikuti pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pemilihan ini diikuti oleh 3 pasang calon, tiga pasang calon yang bersaing tersebut adalah: Muhammad Yunus dan Ahmad Muslimin, Herman Hn dan Yusuf Kohar dan Thobroni Harun dan Komarunizar. Pemilihan ini dilaksanakan berbarengan dengan pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada hari rabu, 9 Desember 2015. Sebenarnya ada satu lagi pasangan calon yaitu Hartanto Lojaya- Riza Mirhadi namun mereka gagal karena belum mendapat dukungan partai politik yang cukup. Pemilihan umum ini diikuti oleh tiga pasangan calon. Pasangan nomor urut satu yaitu Muhammad Yunus dan Ahmad Muslimin mengambil jalur independen. Pasangan nomor urut dua yaitu Herman HN dengan Yusuf Kohar, dan pasangan nomor urut tiga yaitu Wakil Walikota Thobroni Harun dengan Komarunizar.

Tabel 5. Nama Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Nomor Urut	Kandidat Walikota	Kandidat Wakil Walikota	Pennyusung
1.	Muhammad Yunus	Ahmad Muslimin	Independen
2.	Herman HN	Muhammad Yusuf Kohar	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera
3.	Thobroni Harun	Komarunizar	Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Dari tabel diatas bisa dilihat ada 3 calon kandidat yang kuat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tersebut berlangsung selama satu putaran saja, Berikut hasil penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota Bandar Lampung Tahun 2010- 2015

Tabel 6. Rekapitulasi hasil Pemilihan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2015

No	Kandidat	Partai	Suara	Persen
1.	Muhammad Yunus dan Ahmad Muslimin	Independen	8.325	2,01%
2.	Herman HN dan Muhammad Yusuf Kohar	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera	358.249	86,66%
3.	Thobroni Harun dan Komarunizar	Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Hati Nurani Rakyat.	46.814	11,33%

Pleno rekapitulasi dan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung, Rabu (16/12/2015) memastikan bahwa pasangan nomor urut 2 yakni Herman HN dan Yusuf Kohar meraih suara tertinggi 358.249 suara atau 86.66% persen. Sedangkan pasangan calon nomor urut 3, Thobroni Harun dan Komarunizar memperoleh 46.814 suara dan pasangan calon nomor urut 1 M. Yunus dan Ahmad Muslimin, memperoleh 8.325 suara. Jika kita lihat dari data diatas perolehan suara dari pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 9 Desember tahun 2015 yaitu pasangan nomor urut 2 herman Hn dan Yusuf Kohar yang mendapatkan perolehan suara tertinggi dan menetapkan mereka menjadi Walikota dan Wakil Walikota yang baru.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis sebagaimana telah peneliti paparkan di dalam hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sikap Kognitif kiai dan santri terkait dengan pengetahuan tentang pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015, namun untuk santri yang menetap dan santri kalong tidak mengetahui figur, visi misi hingga latar belakang dari Thobroni Harun dan Komarunizar. Hanya kiai saja yang sedikit mengetahui tentang figur, visi misi dan latar belakang dari Thobroni Harun dan Komarunizar hampir secara keseluruhan hampir seluruh informan mengetahui informasi terkait pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.
2. Sikap Afektif kiai dan santri terkait dengan seluruh proses pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015 dan mengaku senang yang ternyata pelaksanaan nya memang sudah ditunggu-tunggu khususnya oleh para santri di pondok pesantren Al-Hikmah, tetapi kiai dan santri menyatakan perasaannya biasa-biasa saja terhadap figur, visi misi dan latar belakang dari Thobroni Harun dan

Komarunizar.

3. Sikap evaluatif kiai dan santri terkait proses pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015 didapati bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung dinilai cukup baik dalam pelaksanaannya baik kiai, santri menetap dan santri kalong memberi penilaian cukup baik untuk pelaksanaannya. Terkait penilaian yang diberikan kiai dan santri tentang figur, visi misi dan latar belakang hampir seluruh informan memberikan penilaian negatif, karena kiai dan santri tidak dapat menilai sebab informan tidak mengetahui tentang figur, visi misi dan latar belakang dari Thobroni Harun dan Komarunizar jadi para informan tidak dapat memberikan penilaiannya.

Berdasarkan analisis dari 3 aspek diatas, sikap politik kiai dan santri menunjukkan sikap negatif terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar. Kiai dan santri di pondok pesantren Al-Hikmah tidak mendukung pasangan calon nomor urut 3 yaitu Thobroni Harun dan Komarunizar dan Yusuf Kohar, melainkan kiai mendukung pasangan diluar orientasinya yaitu diluar Nahdlatul Ulama (NU) selain itu, para pengurus pondok mengarahkan santri yang menetap dipondok pesantren Al-Hikmah untuk mendukung pasangan Herman HN dan Yusuf Kohar.

Berdasarkan klasifikasi budaya politik, dapat disimpulkan bahwa ada 2 jenis budaya politik berbeda yang terdapat didalam pondok pesantren Al-Hikmah. Pertama, budaya politik subjek (kaula), budaya politik ini dimiliki oleh kelompok santri dipondok pesantren Al-Hikmah karena santri hanya memiliki

pengetahuan terhadap sistem politik dan fenomena politik yang terjadi, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (input) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (output) masih sangat rendah.

Sementara itu, kiai memiliki budaya politik partisipan. Kecenderungan ini dilihat dari sikap dimana kiai memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditunjukkan kepada sistem secara keseluruhan. Perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik tinggi, mereka memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa saran dari penulis, yaitu :

1. Kiai dan pengurus pondok pesantren Al-Hikmah sebaiknya memberikan pengetahuan tentang politik kepada para santri agar santri dapat mengetahui setidaknya tentang dunia politik khususnya ketika ada pemilihan Kepala Daerah santri dapat mengetahui siapa kandidat calon Kepala Daerah yang akan santri pilih dan tidak buta akan calon kandidatnya.
2. Kiai dan pengurus pondok pesantren sebaiknya tidak mengintervensi santri untuk memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebaiknya dari pihak pondok membiarkan santri dapat memilih calon Walikota dan Wakil Walikotanya dengan hati nurani dan pilihan dari santri tersebut.
3. Santri seharusnya tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh kiai dan pengurus pondok untuk memilih pasangan calon Walikota dan Wakil

Walikota nomor urut 2 yaitu Herman HN dan Yusuf Kohar, santri sebaiknya dapat memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota sesuai hati nurani, dan pilihan dari santri itu sendiri, jangan mudah terpengaruh dan terintervensi oleh kiai dan pengurus di pondok pesantren Al-Hikmah.

4. Sebaiknya kiai dan pengurus pondok pesantren Al-Hikmah memberikan pendidikan demokrasi kepada santri yang menetap dan santri kalong, agar santri tersebut mengetahui tentang pentingnya pendidikan demokrasi, agar santri tidak mudah terintervensi oleh siapa pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel, A 1990. *Budaya Politik*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Ahmadi, Abu 2012. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bustami, Latif. 2009. *Kiai Politik Politik Kiai*. Malang: Pustaka Bayan.
- Efrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Liberty.
- Effendi, Bakhtiar.1998. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta. Paramadina.
- Gerungan, 2004. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Haidir, Ali. 2014. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hamim, Thoha. 2004. *Islam dan NU di bawah Tekanan Problematika Kontemporer*. Jakarta: Dianatama.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hiroko, Horikoshi. 1987. *Kiyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta.
- Munir, Abdul.1994. *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Politik Kualitatif*. Yogyakarta: LKIS.
- Sastroatmodjo, Sudjono.1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Media
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan.2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Grasindo.

Turmudzi, Endang. 2003. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.

Z. Moelang Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Bandung.

Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. P3M. Jakarta.

Internet

Suhrizal.Pemilukada Regulasi.op.cid.

Yusdianto. 2010. Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme penyelesaiannya. *Jurnal Konstitusi Vol II Nomor 2*.

(<http://wiyonggoputih.blogspot.co.id/2015/04/peran-pesantren-dalam-sejarah-bangsa.html>, diakses tanggal 30 November 2015 pukul 09:22 WIB)

(http://ahid-wahyu-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-92286-Umum-PONDOK%20PESANTREN%20DAN%20PERILAKU%20POLITIK%20Santri, diakses tanggal 26 Desember 2015, 14:46 WIB)

(<http://raudlatululumkencong.blogspot.co.id/2014/02/alamat-lengkap-pondok-pesantren-di.html>, diakses tanggal 1 Desember 2015, 11:29 WIB).

(http://www.kompasiana.com/adiansaputra/bandar-lampung-entitas-santri-perkotaan-yang-cerdas-sebuah-gagasan_55634c14e9afdbc604533efc, diakses tanggal 1 Desember 2015, 10:15 WIB).

(<http://wiyonggoputih.blogspot.co.id/2015/04/peran-pesantren-dalam-sejarah-bangsa.html>, diakses tanggal 1 Desember 2015, 11: 45, WIB)

(www.teraslampung.com/2015/12/pleno-kpu-bandarlampung, diakses tanggal 12 April 2016, 22:32, WIB)

Alhikmah88.blogspot.co.id/?m=1, diakses tanggal 1 Desember 2015, 10.51 WIB

Penelitian Terdahulu

Uly Qonita. (2008). *Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syar'ah Institut. Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*